

STATISTIK PERUMAHAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2020



STATISTIK PERUMAHAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2020,



STATISTIK PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2020

ISBN : 978-602-5407-63-5
Nomor Publikasi : 74000.2155
Katalog : 3303002.74
Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 96 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Desain Sampul:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Dicetak Oleh:

UD. Rezki Bersama

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com, www.pngtree.com, www.pngwing.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara



KATA **PENGANTAR**

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia. Perumahan yang layak dengan kondisi lingkungan yang sehat menjadi sarana untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal sehingga manusia mampu beraktivitas secara produktif. Di tengah pandemi COVID-19, rumah memainkan peranan yang sangat penting karena saat ini sebagian besar aktivitas masyarakat dianjurkan untuk dilakukan dari rumah. Dalam hal ini, rumah dan lingkungan yang sehat menjadi salah satu benteng pertahanan dalam melawan pandemi tersebut.

Mengingat pentingnya informasi terkait perumahan dan kesehatan lingkungan, pemenuhan datanya menjadi perhatian baik secara global maupun nasional. Dalam hal ini, BPS memiliki Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang mengakomodasi berbagai pertanyaan untuk evaluasi pencapaian target pembangunan dari berbagai bidang, termasuk data dan indikator terkait perumahan.

Publikasi Statistik Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara 2020 diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data yang digunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan terkait perumahan dan kesehatan lingkungan. Publikasi ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pembacanya.

Kendari, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tenggara

Agnes Widiastuti



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DATAR GAMBAR.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup.....	2
1.3 Sumber Data dan Informasi.....	3
1.4 Sistematika Penyajian.....	4
BAB II. KONDISI FISIK BANGUNAN.....	5
2.1 Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal.....	5
2.2 Jenis Atap Terluas.....	7
2.3 Jenis Dinding Terluas.....	10
2.4 Luas Lantai Terluas.....	12
2.5 Luas Lantai per Kapita.....	15
BAB III. FASILITAS PERUMAHAN SEHAT DAN LAYAK HUNI	33
3.1 Air Minum.....	33
3.2 Sumber Penerangan.....	36
3.3 Sanitasi.....	38
3.3.1 Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar.....	39
3.3.2 Jenis Kloset.....	41
3.3.3 Tempat Pembuangan Akhir Tinja (TPAT).....	43



	Halaman
BAB IV. KESEHATAN LINGKUNGAN.....	67
4.1 Air Minum Layak.....	68
4.2 Sanitasi Layak.....	71
4.3 Rumah Layak Huni.....	74
4.4 Penggunaan Kayu Bakar untuk Memasak.....	76
BAB V. PENGELUARAN PERUMAHAN.....	81
5.1 Pengeluaran untuk Tempat Tinggal.....	81
5.2 Pengeluaran Listrik.....	83
5.3 Pengeluaran Air.....	85
5.4 Pengeluaran Bahan Bakar untuk Memasak.....	88



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
BAB II. KONDISI FISIK BANGUNAN		
2.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2018 – 2020	19
2.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, 2020	20
2.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas dan Tipe Daerah, 2018	21
2.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas dan Tipe Daerah, 2018	22
2.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas dan Tipe Daerah, 2019	23
2.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas dan Tipe Daerah, 2020	24
2.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas, 2020	25
2.8	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Terluas, 2020	26
2.9	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dan Tipe Daerah, 2018	27
2.10	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dan Tipe Daerah, 2019	28
2.11	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dan Tipe Daerah, 2020	29
2.12	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas, 2020	30
2.13	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita (m ²) dan Tipe Daerah, 2018 – 2020	31

Tabel	Halaman
2.14 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Rumah per Kapita (m ²), 2020	32

BAB III. FASILITAS PERUMAHAN SEHAT DAN LAYAK HUNI

3.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Utama, 2018	47
3.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Utama, 2019	48
3.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Utama, 2020	49
3.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum Utama, 2020	50
3.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Sumber Penerangan Utama, 2018 – 2020	52
3.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Utama Penerangan, 2020	53
3.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah, Kepemilikan dan Penggunaan Fasilitas Tempat BAB, 2018	54
3.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah, Kepemilikan dan Penggunaan Fasilitas Tempat BAB, 2019	55
3.9 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah, Kepemilikan dan Penggunaan Fasilitas Tempat BAB, 2020	56
3.10 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Kepemilikan dan Penggunaan Fasilitas Tempat BAB, 2020	57
3.11 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB Sendiri/Bersama Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kloset, 2018	58
3.12 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB Sendiri/Bersama/MCK Komunal Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kloset, 2019	59

Tabel	Halaman
3.13 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB Sendiri/Bersama/MCK Komunal Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kloset, 2020	60
3.14 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB Sendiri/ Bersama/MCK Komunal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset,2020	61
3.15 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB Sendiri/Bersama Menurut Tipe Daerah dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2018	62
3.16 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB Sendiri/Bersama/MCK Komunal Menurut Tipe Daerah dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2019	63
3.17 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB Sendiri/Bersama/MCK Komunal Menurut Tipe Daerah dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2020	64
3.18 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB Sendiri/Bersama/MCK Komunal Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2020	65
 BAB IV. KESEHATAN LINGKUNGAN	
4.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Kondisi Kesehatan Lingkungan, 2018-2020	79
4.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Kesehatan Lingkungan, 2020	80
 BAB V. PENGELUARAN PERUMAHAN	
5.1 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp) Menurut Jenis Barang Bukan Makanan, 2018-2020	93
5.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp) Menurut Jenis Barang Bukan Makanan dan Kabupaten/Kota, 2020	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
BAB II. KONDISI FISIK BANGUNAN		
2.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2018-2020	6
2.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Rumah Terluas dan Tipe Daerah, 2020	8
2.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Layak, 2018-2020	9
2.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Rumah Terluas dan Tipe Daerah, 2020	10
2.5	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Dinding Layak, 2018-2020	11
2.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Rumah Terluas dan Tipe Daerah, 2020	13
2.7	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Jenis Lantai Rumah Terluas Berupa Tanah Menurut Tipe Daerah, 2018-2020	14
2.8	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai Kurang dari 7,2 Meter Persegi, 2018-2020	16
BAB III. FASILITAS PERUMAHAN SEHAT DAN LAYAK HUNI		
3.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama dan Tipe Daerah, 2020	34
3.2	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Isi Ulang sebagai Sumber Air Minum Utama Menurut Tipe Daerah, 2018-2020	35
3.3	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Utama Menggunakan Listrik Menurut Tipe Daerah, 2018-2020	37
3.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penggunaan Fasilitas Tempat BAB dan Tipe Daerah, 2018-2020	40

Gambar		Halaman
3.5	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB Sendiri/Bersama/MCK Komunal Menurut Jenis Kloset dan Tipe Daerah, 2018-2020	42
3.6	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas BAB Sendiri/Bersama/MCK Komunal Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja (TPAT) dan Tipe Daerah, 2018-2020	44

BAB IV. KESEHATAN LINGKUNGAN

4.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Menurut Tipe Daerah, 2018-2020	69
4.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota, 2020	70
4.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah, 2018-2020	72
4.4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota, 2020	73
4.5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Layak Huni Menurut Tipe Daerah, 2018-2020	75
4.6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota, 2020	76
4.7	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar sebagai Bahan Bakar Utama untuk Memasak Menurut Tipe Daerah, 2018-2020	77

BAB V. PENGELUARAN PERUMAHAN

5.1	Rata-rata Pengeluaran untuk Biaya Tempat Tinggal Perkapita Sebulan menurut Tipe Daerah, 2020	82
5.2	Rata-rata Pengeluaran Listrik Perkapita Sebulan Menurut Tipe Daerah dan Kabupaten/Kota, 2018-2020	84
5.3	Rata-rata Pengeluaran Air Perkapita Sebulan Menurut Tipe Daerah dan Kabupaten/Kota, 2018-2020	86

Gambar		Halaman
5.4	Rata-rata Pengeluaran Air Kemasan/Isi Ulang Perkapita Sebulan Menurut Tipe Daerah, 2018-2020	88
5.5	Rata-rata Pengeluaran Bahan Bakar untuk Memasak Perkapita Sebulan Menurut Tipe Daerah dan Kabupaten/Kota, 2018-2020	89
5.6	Rata-rata Pengeluaran LPG untuk Memasak Perkapita Sebulan, 2018-2020	90

<https://sultra.bps.go.id>



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selain berfungsi sebagai tempat tinggal layak huni yang menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia, rumah juga berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta sebagai aset bagi pemiliknya. Pemenuhan kebutuhan akan rumah ini menjadi salah satu indikator terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya melalui penyelenggaraan perumahan sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Perumahan yang layak memenuhi kriteria kualitas bangunan yang baik yaitu memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, menjamin kesehatan penghuninya, serta mencukupi keluasan minimum. Akan tetapi, kualitas perumahan tidak hanya dilihat dari segi fisik bangunannya, tetapi juga dari kesehatan lingkungannya. Untuk itu, penyediaan perumahan sepatutnya tidak hanya mempertimbangkan pemenuhan syarat bangunan fisik rumah semata, tetapi perlu juga memperhatikan aspek infrastruktur dasar yang melengkapinya seperti air bersih dan sanitasi serta kesehatan lingkungannya.

Dengan meningkatnya kebutuhan akan perumahan seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, tentunya penyediaan perumahan yang memenuhi kriteria layak huni bagi masyarakat menjadi salah satu isu dalam pembangunan. Salah satu isunya adalah keterbatasan lahan yang dapat memicu permasalahan penurunan kualitas lingkungan dan bertambahnya permukiman kumuh. Tingginya harga lahan dan perumahan, khususnya di daerah perkotaan, juga menjadi isu tersendiri dikarenakan masyarakat yang berpenghasilan rendah sulit untuk menjangkaunya. Jika dibiarkan, kondisi ini

hanya dapat membawa masyarakat hidup di lingkungan yang tidak sehat dan semakin jauh dari kesejahteraan.

Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia sejak awal tahun 2020, kebutuhan akan rumah dan lingkungan yang sehat semakin dipertegas. Pandemi COVID-19 ini membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat dunia, dalam kondisi ini masyarakat diminta untuk beraktivitas dari rumah dan selalu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkup pribadi dan lingkungan sekitar. Dalam situasi tersebut, rumah dan lingkungan yang sehat menjadi salah satu benteng pertahanan agar masyarakat terhindar dari virus tersebut.

Penyediaan perumahan layak huni yang ditopang dengan sistem penyediaan air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain itu, agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) juga menempatkan rumah dan lingkungan sehat sebagai prioritas capaiannya. Hal ini tertuang dalam tiga tujuan TPB yaitu Tujuan 6 (Air bersih dan Sanitasi), Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), dan Tujuan 11 (Komunitas dan Perkotaan yang Berkelanjutan).

1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara 2020 disusun guna menyajikan berbagai data dan informasi mengenai capaian indikator perumahan dan kesehatan lingkungan, serta sebagai upaya mendukung tercapainya target-target nasional serta global terkait perumahan dan kesehatan lingkungan.

Sumber data yang digunakan pada publikasi ini adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang juga merupakan salah satu wujud tanggung jawab BPS terhadap pemenuhan data dan informasi sebagai perencanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan. Dengan satu sumber data, maka gambaran berbagai indikator perumahan dan kesehatan lingkungan yang

tercantum pada publikasi ini selaras dengan pembangunan nasional (RPJMN 2020-2024) dan global (TPB).

Publikasi ini mengulas beberapa indikator terkait perumahan dan lingkungan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020, meliputi kondisi fisik bangunan, fasilitas perumahan, kesehatan lingkungan, dan pengeluaran untuk perumahan. Berbagai disagregasi penyajian data juga dilakukan guna memperkaya informasi yang disajikan menurut tipe daerah tempat tinggal dan pembagian wilayah regional. Selain itu, beberapa data juga disajikan untuk tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan pembandingan.

1.3 Sumber Data dan Informasi

Informasi terkait kondisi perumahan dan kesehatan lingkungan pada publikasi ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikumpulkan pada tahun 2018-2020. Rumah tangga yang dipilih dalam sampel adalah rumah tangga biasa, sedangkan rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus dan rumah tangga khusus seperti asrama, penjara, dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih menjadi sampel.

Susenas merupakan survei yang rutin dilaksanakan oleh BPS setiap tahun secara periodik, yaitu pada bulan Maret dan September. Data hasil pendataan di bulan Maret dapat disajikan hingga level kabupaten/kota, sedangkan data hasil pendataan di bulan September hanya dapat disajikan



hingga level nasional atau provinsi. Data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil pendataan Susenas di bulan Maret. Melalui Susenas juga dapat diperoleh informasi mengenai berbagai aspek pemenuhan kebutuhan hidup selain perumahan, seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Pengumpulan data dari rumah tangga sampel dalam Susenas dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden

menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Untuk pertanyaan yang ditujukan kepada individu, pencacah mengusahakan untuk mewawancarai individu yang bersangkutan. Jika tidak memungkinkan, informasi dapat diperoleh dari anggota rumah tangga lain yang dapat menjelaskan atau mengetahui informasi tentang individu yang bersangkutan. Sementara itu, keterangan mengenai rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara kepada kepala rumah tangga, pasangan kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik rumah tangga yang ditanyakan.

Seluruh tahapan pengolahan data Susenas dilakukan dengan menggunakan komputer, meliputi tahapan perekaman data, pemeriksaan konsistensi antar-isian dalam kuesioner sampai dengan tahapan tabulasi. Tahapan tersebut dapat dilakukan setelah melakukan tahapan prakomputer yang meliputi pengecekan awal kelengkapan isian kuesioner, penyuntingan terhadap isian tidak wajar, termasuk konsistensi antarisian jawaban.

1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian publikasi Statistik Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara 2020 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu antara lain:

- Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan dan ruang lingkup, sumber data, serta sistematika penyajian.
- Bab II : Kondisi Fisik Bangunan yang meliputi status kepemilikan, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, serta jenis dan luas lantai bangunan tempat tinggal.
- Bab III : Fasilitas Perumahan yang meliputi air minum, sumber penerangan, dan tempat buang air bersih.
- Bab IV : Kesehatan Lingkungan yang meliputi air minum layak, sanitasi layak, rumah tidak layak huni, dan bahan bakar untuk memasak.
- Bab V : Pengeluaran Perumahan yang meliputi pengeluaran untuk tempat tinggal, listrik, air, dan bahan bakar untuk memasak.



BAB II

KONDISI FISIK BANGUNAN

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dari pernyataan yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 H ini, terlihat bahwa bertempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, selain sandang dan pangan, yang harus dipenuhi agar masyarakat Indonesia dapat hidup sejahtera. Negara bertanggung jawab melindungi pemenuhan kebutuhan bertempat tinggal melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Sebagai wujud komitmen atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk bertempat tinggal, pemerintah berupaya meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan TPB. Indikator keberhasilannya adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah yang layak, aman, dan terjangkau. Pengukuran keberhasilan indikator ini dibagi beberapa kriteria, yaitu: (1) ketahanan bangunan; (2) kecukupan luas tempat tinggal; (3) akses air minum layak; (4) akses sanitasi layak; (5) permukiman kumuh; (6) keamanan bermukim; dan (7) keterjangkauan.

Bab ini mengulas informasi terkait capaian indikator keamanan bermukim yang didekati dengan status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal. Selain itu, bab ini juga mengulas tentang kondisi fisik bangunan yang berkaitan dengan kriteria ketahanan bangunan dan kecukupan luas tempat tinggal. Kriteria ketahanan bangunan didekati dengan jenis material bahan bangunan.

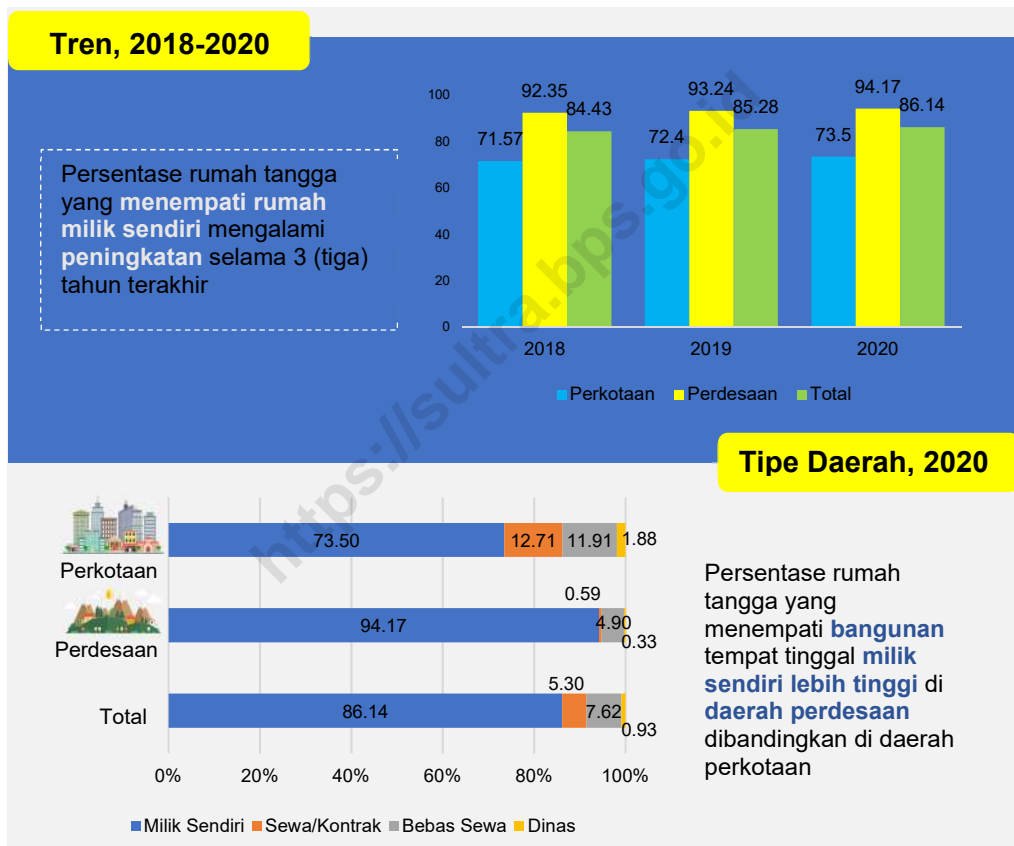
2.1 Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal

Rumah atau bangunan tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Kepemilikan rumah/bangunan

KONDISI FISIK BANGUNAN

tempat tinggal ini merupakan pendekatan untuk mengukur indikator keamanan bermukim. Idealnya, setiap rumah tangga dapat menempati rumah atau bangunan tempat tinggal milik sendiri. Dalam Susenas, terdapat 5 (lima) status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati rumah tangga, yaitu meliputi rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dinas, dan lainnya.

Gambar 2.1.
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2018-2020



Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan, yaitu dari 84,43 persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 86,14 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2020, masih ada sekitar 13,86 persen *backlog* rumah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Isu *backlog* rumah ini lebih dominan di

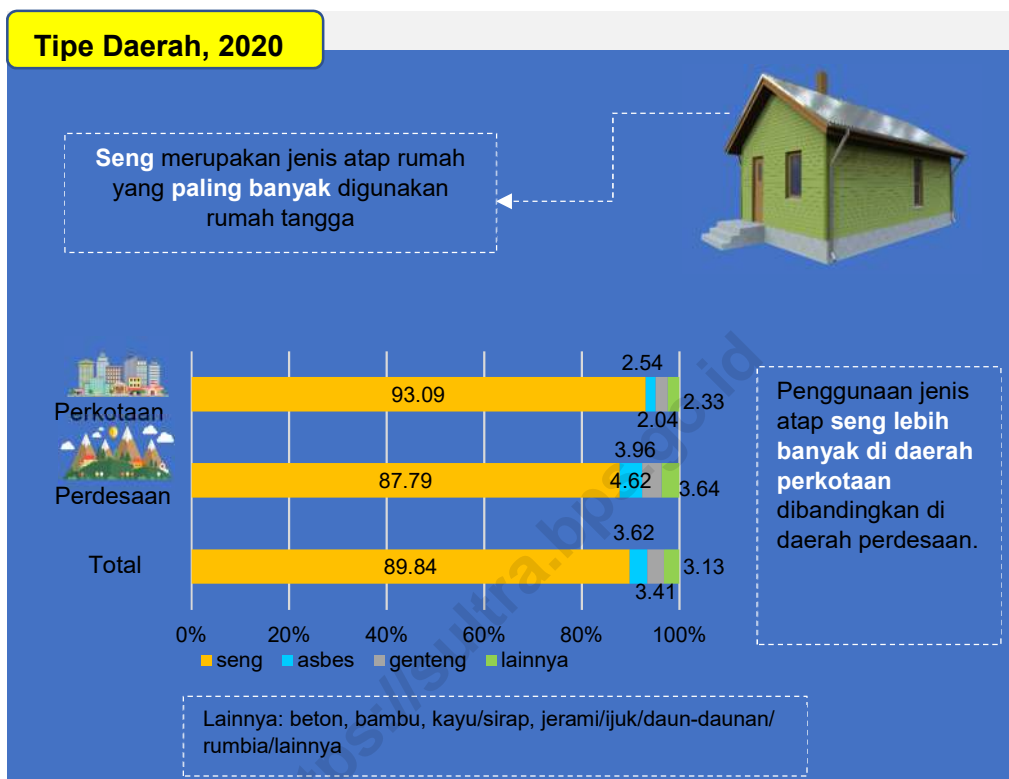
daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan masih tingginya *backlog* rumah di daerah perkotaan adalah keterbatasan lahan untuk tempat tinggal yang dapat meningkatkan densitas penduduk. Kondisi ini juga yang dapat menyebabkan harga lahan permukiman dan rumah tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan.

Selain itu, cukup banyak rumah tangga di daerah perkotaan yang menempati bangunan tempat tinggal dengan cara mengontrak/menyewa. Pada Gambar 2.1 terlihat bahwa sekitar 12,71 persen rumah tangga di daerah perkotaan menempati bangunan tempat tinggal dengan cara mengontrak/menyewa. Seperti yang telah diketahui, daerah perkotaan memiliki faktor penarik yang menyebabkan terjadinya urbanisasi, salah satunya adalah fasilitas pendidikan dan lapangan pekerjaan. Penduduk yang pindah ke daerah perkotaan untuk melanjutkan pendidikan ataupun mencari pekerjaan/bekerja biasanya memilih untuk tinggal dengan cara mengontrak/menyewa rumah. Selain itu, tingginya harga lahan untuk permukiman dan rumah di daerah perkotaan juga dapat menyebabkan rumah tangga kesulitan untuk memiliki rumah sendiri, sehingga terpaksa untuk tinggal dengan cara mengontrak/menyewa. Akan tetapi, masih diperlukan kajian lebih lanjut terkait penyebab tingginya persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal dengan cara mengontrak/menyewa di daerah perkotaan.

2.2 Jenis Atap Terluas

Atap merupakan bagian struktur atas dari bangunan yang berfungsi sebagai penutup dan pelindung penghuninya dari pengaruh panas dan hujan, angin, serta gangguan cuaca/iklim lainnya. Selain struktur konstruksi atap bangunan yang harus kuat dan kokoh, pemilihan jenis bahan utama dari atap bangunan juga sangat penting agar atap dapat berfungsi dengan baik sebagai pelindung. Dalam Susenas, terdapat beberapa jenis bahan atap rumah terluas yang biasa digunakan rumah tangga, yaitu beton, genteng, seng, asbes, bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia, dan lainnya.

Gambar 2.2.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Rumah Terluas dan Tipe Daerah, 2020



Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Pada tahun 2020, sebagian besar rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan seng sebagai bahan atap terluas untuk rumahnya. Persentase penggunaan seng sebagai bahan utama atap terluas rumah ini lebih tinggi pada daerah perkotaan (93,09 persen) dibanding daerah perdesaan (87,79 persen).

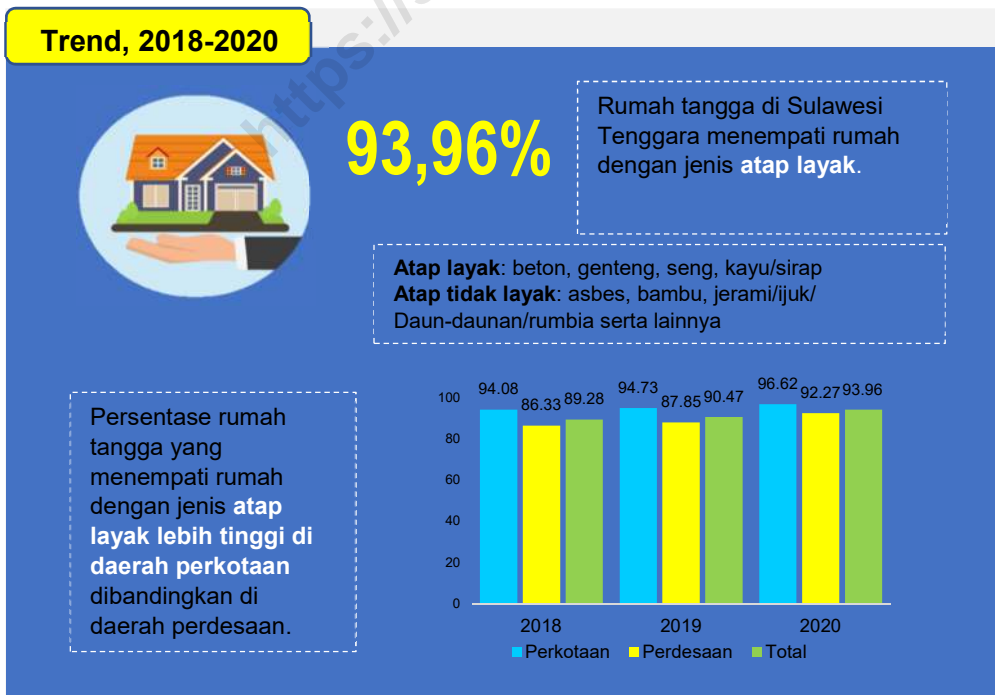
Pada tahun 2020, masih terdapat 3,62 persen rumah tangga yang menggunakan asbes sebagai bahan utama atap terluas rumah. Persentase penggunaan asbes sebagai bahan utama atap terluas rumah di daerah perdesaan (4,62 persen) lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan (2,54 persen). Bahkan pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, persentase rumah tangga yang menggunakan asbes sebagai

bahan utama atap terluas rumah melebihi 10 persen, seperti Kabupaten Buton (13,31 persen), Kabupaten Wakatobi (21,96 persen), Kabupaten Buton Utara (23,73 persen), dan Kabupaten Konawe Kepulauan (26,10 persen).

Masih banyaknya rumah tangga yang menggunakan asbes sebagai jenis atap rumahnya perlu mendapat perhatian lebih, mengingat asbes merupakan bahan karsinogenik (zat yang dapat menyebabkan pertumbuhan sel kanker). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, asbes dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan beracun. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, asbes masuk kategori pertama (A1) sebagai bahan berbahaya dan beracun. WHO juga melarang penggunaan asbes karena dapat menyebabkan mesothelioma dan kanker paru-paru, laring dan ovarium. Asbes dapat mengeluarkan debu atau serat ke udara sehingga bisa terhirup dan terperangkap di selaput lendir hidung dan tenggorokan yang kemudian masuk ke dalam paru-paru, atau jika tertelan, dapat masuk ke saluran pencernaan.

Gambar 2.3.

Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Layak, 2018-2020



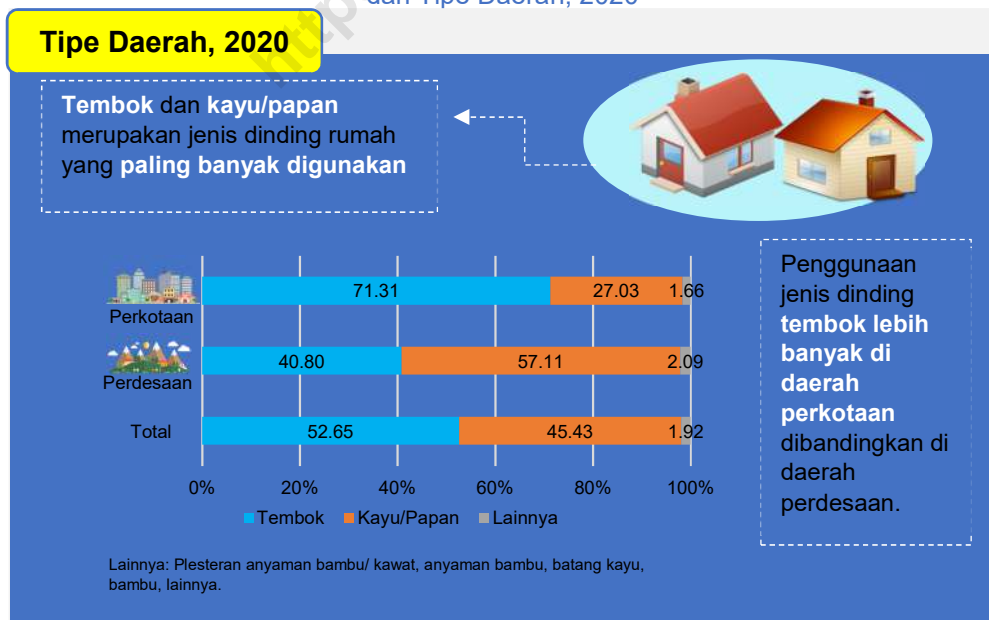
Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Apabila dilihat berdasarkan penggunaan jenis atap yang layak yaitu jenis atap beton, genteng, seng, dan kayu/sirap, sekitar 93,96 persen rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara telah menggunakan jenis atap yang layak untuk bangunan tempat tinggalnya pada tahun 2020, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 89,28 persen. Persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan jenis atap layak ini lebih banyak pada daerah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan.

2.3 Jenis Dinding Terluas

Dinding merupakan salah satu komponen bangunan yang penting untuk diperhatikan karena fungsinya sebagai penopang bangunan secara keseluruhan. Dalam Susenas, konsep dinding yang digunakan adalah bagian sisi luar atau batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lainnya. Terdapat 7 (tujuh) jenis bahan utama dinding rumah yang dicakup dalam Susenas, yaitu tembok, plesteran anyaman bambu/ kawat, kayu/papan, anyaman bambu, batang kayu, bambu, dan lainnya.

Gambar 2.4.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Rumah Terluas dan Tipe Daerah, 2020

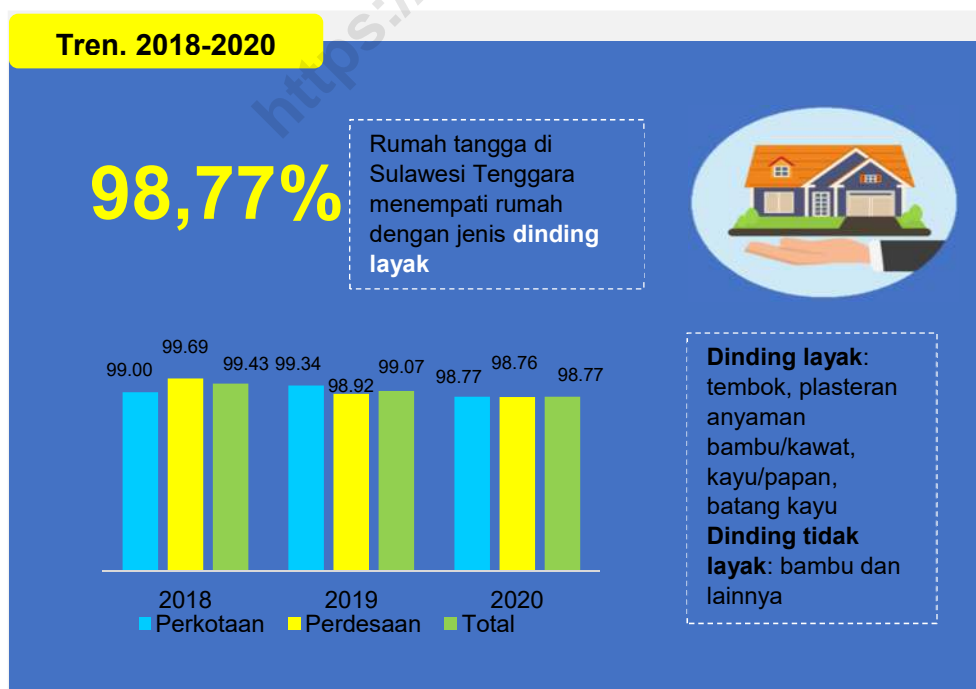


Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Pada tahun 2020, sebagian besar rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan tembok sebagai jenis bahan utama dinding terluas rumahnya, yaitu sekitar 52,65 persen. Penggunaan tembok sebagai jenis bahan utama dinding terluas lebih tinggi pada daerah perkotaan (71,31 persen) dibandingkan dengan daerah perdesaan (40,80 persen). Selain tembok, kayu/papan juga banyak digunakan rumah tangga sebagai bahan utama dinding terluas rumahnya, terutama oleh rumah tangga di daerah perdesaan (57,11 persen).

Meskipun secara keseluruhan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagian besar rumah tangga menggunakan tembok sebagai jenis dinding terluas rumahnya, ada beberapa kabupaten/kota yang sebagian besar rumah tangganya menggunakan kayu/papan sebagai jenis dinding terluas rumahnya, seperti pada Kabupaten Kolaka Timur (61,56 persen) dan Kabupaten Muna Barat (67,89 persen).

Gambar 2.5.
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah
dengan Dinding Layak, 2018-2020



Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

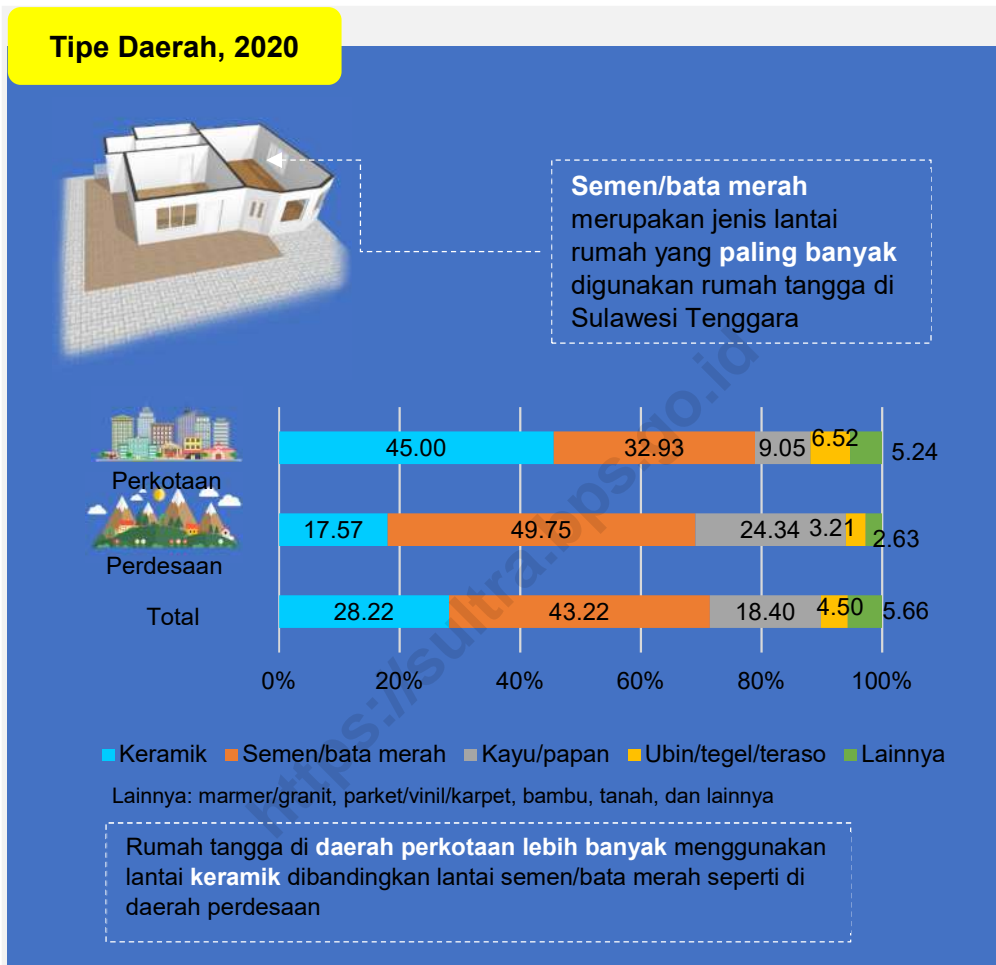
Jika jenis bahan utama dinding terluas rumah dikelompokkan berdasarkan kelayakannya, dimana jenis dinding tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu termasuk jenis dinding yang layak, sebanyak 98,77 persen rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara telah menempati rumah dengan dinding yang layak. Kondisi kelayakan dinding yang digunakan oleh rumah tangga di daerah perkotaan dan perdesaan cenderung sama yaitu berkisar 98 persen.

2.4 Jenis Lantai Terluas

Selain jenis atap dan jenis dinding, bagian fisik bangunan tempat tinggal lainnya yang menjadi kriteria penilaian rumah layak huni dari segi ketahanan bangunan adalah jenis lantai. Lantai dari rumah layak huni harus dapat memutus kontak dengan kuman dan parasit yang ada di tanah. Oleh karena itu, jenis lantai yang berupa tanah dianggap sebagai salah satu kriteria rumah tidak layak huni. Dalam Susenas, terdapat beberapa jenis bahan utama lantai terluas rumah, yaitu marmar/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah, dan lainnya.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2020, jenis bahan utama lantai terluas yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah semen/bata merah, yaitu sebesar 43,22 persen. Selain semen/bata merah, jenis lantai kayu/papan juga banyak digunakan di daerah perdesaan, yakni sebesar 24,34 persen. Sementara itu, rumah tangga di daerah perkotaan lebih banyak menggunakan jenis lantai keramik (45 persen) dibandingkan semen/bata merah (32,93 persen).

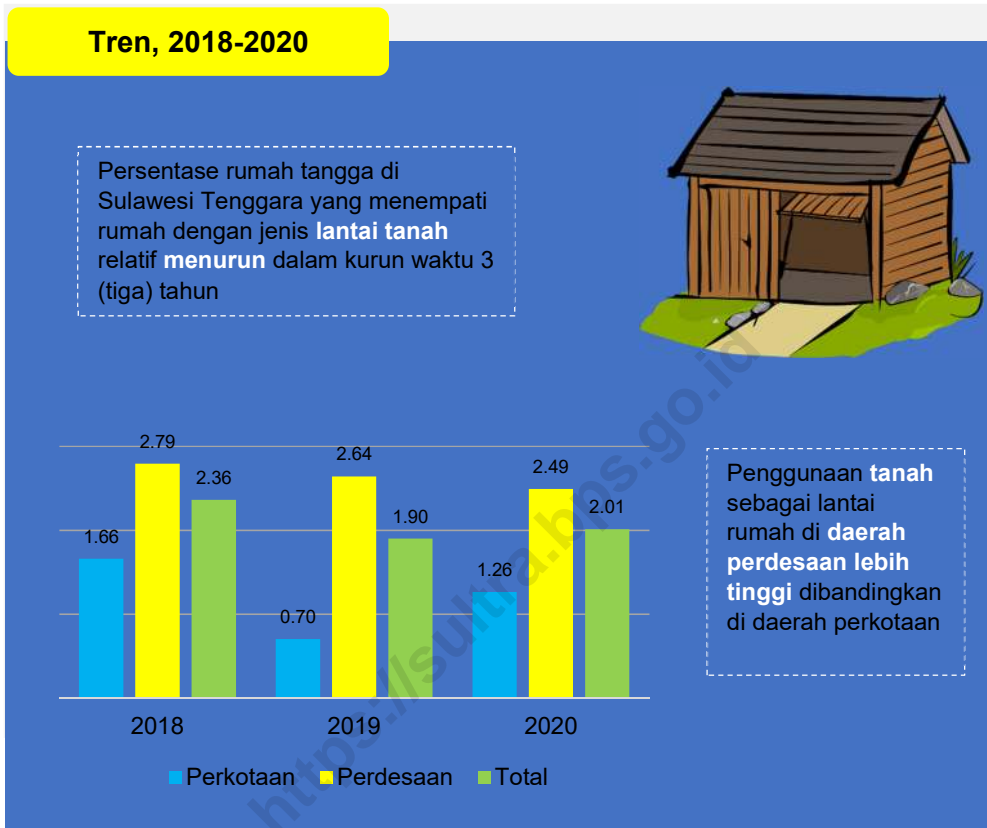
Gambar 2.6.
 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Rumah Terluas dan Tipe Daerah, 2020



Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Jika dikaitkan dengan kriteria kelayakan rumah, pada tahun 2020, sekitar 2 (dua) dari 100 rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menempati rumah dengan jenis lantai rumah terluas berupa tanah, atau dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni di tahun 2020. Jumlahnya cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, meskipun penurunannya tidak terlalu besar.

Gambar 2.7.
 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Jenis Lantai Rumah
 Terlulus Berupa Tanah Menurut Tipe Daerah, 2018-2020



Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

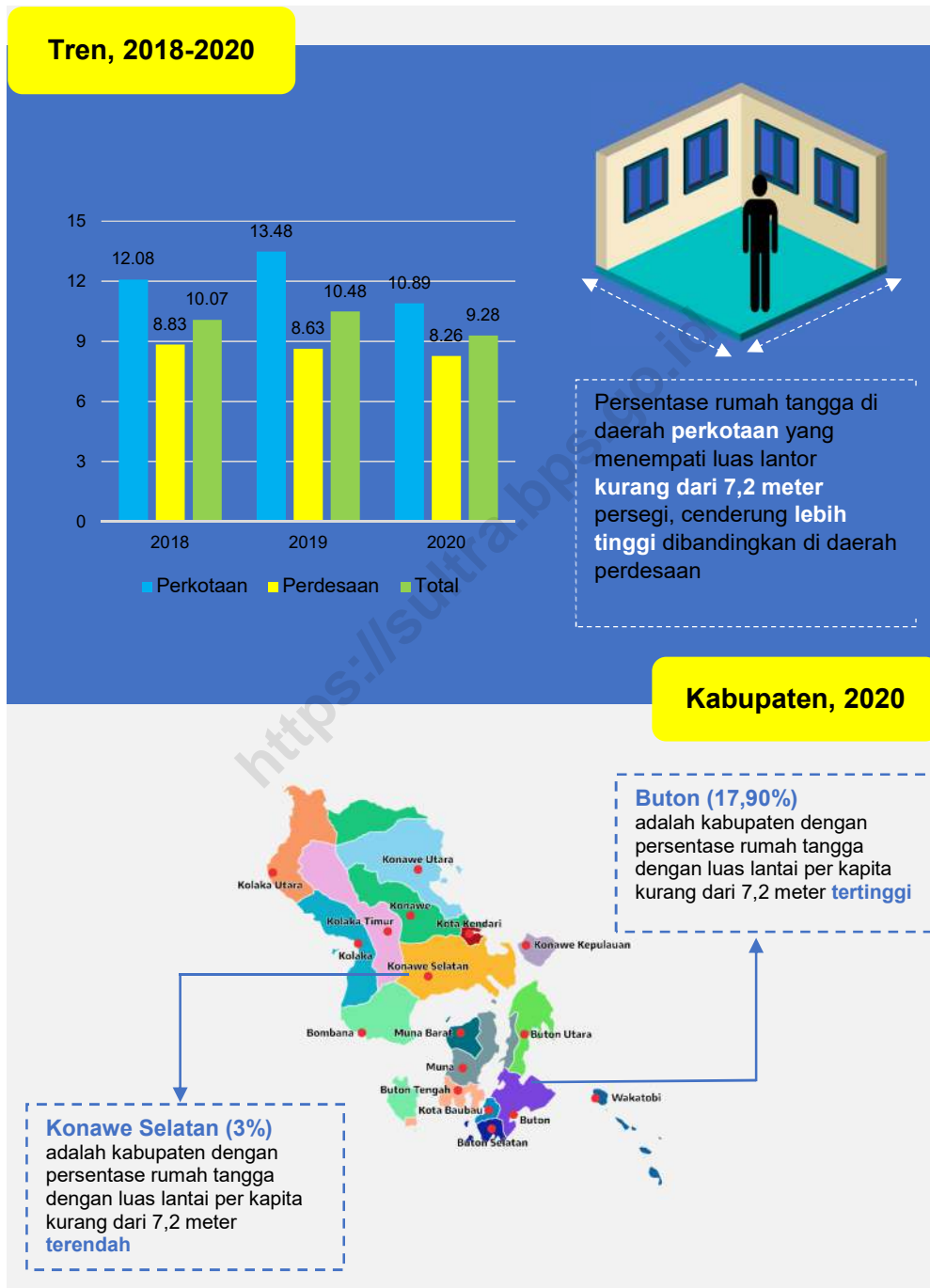
Di antara kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Timur memiliki persentase tertinggi rumah tangga yang menempati rumah dengan jenis lantai rumah terlulus berupa tanah, yaitu sekitar 4,51 persen, diikuti oleh Kabupaten Konawe Selatan yaitu sekitar 3,29 persen. Rumah dengan lantai berupa tanah dianggap tidak layak huni sebab tanah dapat menyebabkan munculnya koloni bakteri, cacing serta gangguan/penyakit lain terhadap penghuninya, terutama saat musim hujan. Tanah juga mengandung fraksi anorganik seperti silika yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan.

2.5 Luas Lantai per Kapita

Selain kriteria ketahanan bangunan, kriteria rumah layak huni lainnya adalah memenuhi kecukupan luas bangunan tempat tinggal per kapita. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa salah satu kriteria rumah layak huni adalah memenuhi kecukupan luas minimum perkapita 7,2 meter persegi sampai dengan 12 meter persegi. Kriteria ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan ruang gerak dari setiap penghuni dalam melakukan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Salah satu batasan luas lantai per kapita yang sering digunakan adalah minimal seluas 7,2 meter persegi.

Pada tahun 2020, sekitar 9 dari 100 rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih menempati rumah dengan luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, terjadi penurunan persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan tipe daerahnya, persentase rumah tangga di daerah perkotaan yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan. Hal ini disebabkan karena kepadatan penduduk di wilayah perkotaan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di wilayah perkotaan ini dapat menyebabkan semakin banyak rumah yang tidak layak huni.

Gambar 2.8.
 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai Kurang dari 7,2 Meter Persegi, 2018-2020



Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Di antara kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton merupakan kabupaten dengan persentase tertinggi untuk rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi, yaitu sebesar 17,90 persen. Kabupaten Buton Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton juga memiliki persentase yang cukup tinggi untuk rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi, yaitu sebesar 17,53 persen. Kota Kendari, yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki persentase rumah tangga dengan luas lantai 7,2 meter persegi yang cukup besar, yaitu 14,32 persen. Sementara itu, kabupaten yang memiliki persentase terendah untuk rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi adalah Kabupaten Konawe Selatan, yakni sebesar 3 persen.

Tabel 2.1.
 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal
 dan Tipe Daerah, 2018 – 2020

Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tahun 2018			
Milik Sendiri	71,57	92,35	84,43
Kontrak/Sewa	14,05	0,72	5,80
Bebas Sewa	12,14	6,14	8,43
Dinas	2,25	0,79	1,35
Tahun 2019			
Milik Sendiri	72,40	93,24	85,28
Kontrak/Sewa	14,35	0,75	5,95
Bebas Sewa	11,99	5,46	7,95
Dinas	1,17	0,42	0,71
Lainnya	0,10	0,13	0,12
Tahun 2020			
Milik Sendiri	73,50	94,17	86,14
Kontrak/Sewa	12,71	0,59	5,30
Bebas Sewa	11,91	4,90	7,62
Dinas	1,88	0,33	0,93

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Tabel 2.2.
 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan
 Bangunan Tempat Tinggal, 2020

Kabupaten/Kota	Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal			
	Milik sendiri	Kontrak/ sewa	Bebas sewa	Dinas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buton	88,91	1,44	8,46	1,19
Muna	88,72	2,45	7,54	1,30
Konawe	92,94	1,44	5,62	0,00
Kolaka	89,39	2,06	5,11	3,44
Konawe Selatan	96,95	0,21	2,52	0,32
Bombana	93,23	1,89	4,60	0,29
Wakatobi	92,45	2,19	5,22	0,14
Kolaka Utara	86,51	1,35	10,71	1,42
Buton Utara	91,68	1,16	7,01	0,15
Konawe Utara	92,40	0,58	4,12	2,90
Kolaka Timur	91,65	5,49	2,31	0,55
Konawe Kepulauan	95,98	0,08	2,78	1,16
Muna Barat	94,54	0,00	5,20	0,26
Buton Tengah	86,35	0,13	13,48	0,04
Buton Selatan	92,35	0,00	7,56	0,09
Kendari	62,64	22,87	13,00	1,50
Baubau	71,64	8,20	19,60	0,56
Sulawesi Tenggara	86,14	5,30	7,62	0,93

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Tabel 2.3.
 Persentase Rumah Tangga Menurut
 Jenis Atap Terluas dan Tipe Daerah, 2018

Jenis Atap Terluas	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Beton	0,99	0,45	0,65
Genteng	1,96	6,13	4,54
Seng	91,13	75,59	83,99
Asbes	4,18	7,61	6,30
Kayu/Sirap	0,00	0,16	0,10
Bambu/Jerami/ljuk/ Daun-daunan/ Rumbia	1,73	6,07	4,42

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018

Tabel 2.4.
 Persentase Rumah Tangga Menurut
 Jenis Atap Terluas dan Tipe Daerah, 2019

Jenis Atap Terluas	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Beton	1,83	0,51	1,01
Genteng	2,51	5,10	4,11
Seng	90,37	81,92	85,15
Asbes	3,99	7,23	5,99
Kayu/Sirap	0,02	0,32	0,20
Bambu/Jerami/ljuk/ Daun-daunan/ Rumbia	1,28	4,92	3,53

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2019

Tabel 2.5.
 Persentase Rumah Tangga Menurut
 Jenis Atap Terluas dan Tipe Daerah, 2020

Jenis Atap Terluas	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Beton	0,99	0,47	0,68
Genteng	2,54	3,96	3,41
Seng	93,09	87,79	89,84
Asbes	2,04	4,62	3,62
Kayu/Sirap	0,00	0,05	0,03
Bambu/Jerami/ljuk/ Daun-daunan/ Rumbia	1,34	3,11	2,42

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Tabel 2.6.
 Persentase Rumah Tangga Menurut
 Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas, 2020

Kabupaten/Kota	Jenis Atap Terluas						Jerami/ Ijuk/ Rumbia
	Beton	Genteng	Seng	Asbes	Bambu	Kayu/Sirap	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Buton	0,67	1,81	82,87	13,31	0,41	0,22	0,71
Muna	0,65	1,77	95,81	0,89	0,00	0,00	0,88
Konawe	1,16	5,03	88,11	0,16	0,00	0,00	5,54
Kolaka	0,50	2,22	95,71	0,74	0,26	0,34	0,23
Konawe Selatan	0,12	7,08	85,97	3,15	0,00	0,00	3,68
Bombana	0,48	3,21	90,64	2,78	0,15	0,00	2,74
Wakatobi	1,33	3,15	73,56	21,96	0,00	0,00	0,00
Kolaka Utara	1,05	1,57	95,88	0,83	0,00	0,00	0,67
Buton Utara	0,37	1,85	70,38	23,73	0,12	0,00	3,55
Konawe Utara	0,00	0,97	90,03	1,84	0,16	0,00	6,99
Kolaka Timur	1,27	4,78	91,44	0,11	0,00	0,00	2,40
Konawe Kepulauan	0,21	2,09	64,67	26,10	0,50	0,00	6,42
Muna Barat	0,00	2,00	93,06	2,13	0,00	0,00	2,81
Buton Tengah	0,18	0,45	84,19	5,59	2,69	0,00	6,91
Buton Selatan	1,28	2,97	87,93	6,20	0,26	0,00	1,36
Kendari	0,65	4,13	93,39	1,03	0,00	0,00	0,80
Baubau	0,89	0,99	97,17	0,95	0,00	0,00	0,00
Sulawesi Tenggara	0,68	3,41	89,84	3,62	0,15	0,03	2,27

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Tabel 2.7.
 Persentase Rumah Tangga Menurut
 Jenis Dinding Terluas dan Tipe Daerah, 2018–2020

Jenis Dinding Terluas	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tahun 2018			
Tembok	64,77	37,89	48,14
Kayu/Papan	33,76	60,77	50,48
Bambu*	0,47	1,03	0,81
Lainnya	1,00	0,31	0,57
Tahun 2019			
Tembok	68,83	39,91	50,95
Kayu/Papan	29,33	57,79	46,92
Bambu*	0,88	1,17	1,05
Lainnya	0,96	1,13	1,07
Tahun 2020			
Tembok	71,31	40,80	52,65
Kayu/Papan	27,03	57,11	45,43
Bambu*	0,43	0,87	0,70
Lainnya	1,24	1,22	1,23

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Keterangan:

* Termasuk anyaman bambu, plesteran anyaman bambu

Tabel 2.8.
 Persentase Rumah Tangga Menurut
 Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Terluas, 2020

Kabupaten/Kota	Jenis Dinding Terluas			
	Tembok	Papan/Kayu	Bambu*	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buton	55,56	42,35	1,19	0,91
Muna	44,86	53,77	0,51	0,86
Konawe	47,69	50,04	0,08	2,19
Kolaka	49,52	49,92	0,00	0,56
Konawe Selatan	44,36	55,05	0,21	0,38
Bombana	44,26	51,27	0,28	4,20
Wakatobi	70,86	25,77	2,03	1,34
Kolaka Utara	38,82	58,70	0,00	2,48
Buton Utara	50,10	47,65	1,24	1,01
Konawe Utara	48,66	51,09	0,00	0,26
Kolaka Timur	38,13	61,56	0,00	0,31
Konawe Kepulauan	53,49	41,21	0,00	5,30
Muna Barat	30,32	67,89	0,76	1,03
Buton Tengah	55,17	40,52	4,20	0,10
Buton Selatan	51,03	40,12	7,81	1,04
Kendari	75,71	23,55	0,00	0,73
Baubau	73,13	24,52	1,49	0,86
Sulawesi Tenggara	52,65	45,43	0,70	1,23

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Keterangan:

* Termasuk anyaman bambu, plesteran anyaman bambu

Tabel 2.9.
 Persentase Rumah Tangga Menurut
 Jenis Lantai Terluas dan Tipe Daerah, 2018

Jenis Lantai Terluas	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Marmar/Granit/Keramik	44,95	17,46	27,94
Tegel/Teraso	1,54	3,31	2,63
Kayu/Papan	9,39	25,78	19,54
Semen/Bata Merah	42,08	49,16	46,46
Bambu	0,38	1,49	1,07
Tanah	1,66	2,79	2,36

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018

Tabel 2.10.
 Persentase Rumah Tangga Menurut
 Jenis Lantai Terluas dan Tipe Daerah, 2019

Jenis Lantai Terluas	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Marmir/Granit/Keramik	49,19	19,24	30,68
Tegel/Teraso	7,00	3,09	4,58
Kayu/Papan	8,21	24,44	18,24
Semen/Bata Merah	34,32	48,84	43,29
Bambu	0,58	1,76	1,31
Tanah	0,70	2,64	1,90

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2019

Tabel 2.11.
 Persentase Rumah Tangga Menurut
 Jenis Lantai Terluas dan Tipe Daerah, 2020

Jenis Lantai Terluas	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Marmar/Granit/Keramik	49,41	18,83	30,70
Tegel/Teraso	6,52	3,21	4,50
Kayu/Papan	9,05	24,34	18,40
Semen/Bata Merah	32,93	49,75	43,22
Bambu	0,84	1,38	1,17
Tanah	1,26	2,49	2,01

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Tabel 2.22.
 Persentase Rumah Tangga Menurut
 Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas, 2020

Kabupaten/Kota	Jenis Lantai Terluas					
	Marmer/ Granit/ Keramik	Tegel/ Teraso	Kayu/ Papan	Semen/ Bata Merah	Bambu	Tanah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	25,17	2,81	29,88	38,59	1,50	2,05
Muna	28,57	0,68	36,10	32,34	0,00	2,31
Konawe	21,46	2,19	5,43	67,76	0,00	3,16
Kolaka	29,73	4,20	14,13	50,82	0,01	1,12
Konawe Selatan	22,09	2,41	8,47	63,73	0,00	3,29
Bombana	28,31	1,56	26,68	42,39	0,00	1,05
Wakatobi	39,57	10,80	22,19	20,71	6,74	0,00
Kolaka Utara	15,37	9,94	28,02	45,80	0,34	0,53
Buton Utara	30,69	4,78	33,75	29,18	0,51	1,09
Konawe Utara	22,78	0,88	11,81	62,57	0,00	1,96
Kolaka Timur	12,38	12,39	17,49	52,89	0,34	4,51
Konawe Kepulauan	20,09	3,29	17,30	56,19	1,28	1,87
Muna Barat	12,01	2,41	47,52	35,33	0,45	2,29
Buton Tengah	25,75	9,42	36,91	19,36	6,04	2,52
Buton Selatan	19,54	5,83	29,33	27,03	17,40	0,87
Kendari	59,27	5,39	5,43	28,49	0,00	1,42
Baubau	53,35	0,45	12,83	30,52	1,87	0,98
Sulawesi Tenggara	30,70	4,50	18,40	43,22	1,17	2,01

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Tabel 2.13.
 Persentase Rumah Tangga Menurut
 Luas Lantai per Kapita (m²) dan Tipe Daerah, 2018 – 2020

Luas Lantai Rumah per Kapita (m ²)	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tahun 2018			
< 7,2	12,08	8,83	10,07
≥ 7,2	87,92	87,92	89,93
Tahun 2019			
< 7,2	13,48	8,63	10,48
≥ 7,2	86,52	91,37	91,37
Tahun 2020			
< 7,2	10,89	8,26	9,28
≥ 7,2	89,11	91,74	90,72

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Tabel 2.14
 Persentase Rumah Tangga Menurut
 Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Rumah per Kapita (m²), 2020

Kabupaten/Kota	Luas Lantai Rumah per Kapita (m ²)	
	≤ 7,2	≥ 7,2
(1)	(2)	(3)
Buton	17,90	82,10
Muna	13,33	86,67
Konawe	3,33	96,67
Kolaka	5,11	94,89
Konawe Selatan	3,00	97,00
Bombana	7,82	92,18
Wakatobi	8,37	91,63
Kolaka Utara	8,84	91,16
Buton Utara	12,75	87,25
Konawe Utara	4,24	95,76
Kolaka Timur	5,71	94,29
Konawe Kepulauan	4,74	95,26
Muna Barat	13,84	86,16
Buton Tengah	13,32	86,68
Buton Selatan	17,53	82,47
Kendari	14,32	85,68
Baubau	13,21	86,79
Sulawesi Tenggara	9,28	90,72

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020



BAB III

FASILITAS PERUMAHAN SEHAT DAN LAYAK HUNI

Selain bertempat tinggal di rumah yang layak huni, masyarakat juga berhak untuk mendapatkan lingkungan rumah yang baik dan sehat, sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 H. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan rumah sepatutnya tidak hanya memperhatikan syarat fisik bangunan, tetapi juga mempertimbangkan dukungan fasilitas dasar yang melengkapi rumah dan lingkungan yang sehat, seperti air bersih dan sanitasi. Sebagai upaya pemenuhan rumah layak huni dan sehat untuk masyarakat, pemerintah bertanggung jawab sebagai fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan pembiayaan dan/atau pembangunan prasarana, sarana, dan fasilitas umum di lingkungan perumahan.

Bab ini secara khusus membahas mengenai prasarana rumah atau kelengkapan dasar fisik rumah yaitu air minum, sumber penerangan, dan fasilitas Buang Air Besar (BAB). Data yang disajikan dalam bab ini bersumber dari Susenas Maret tahun 2018, 2019, dan 2020.

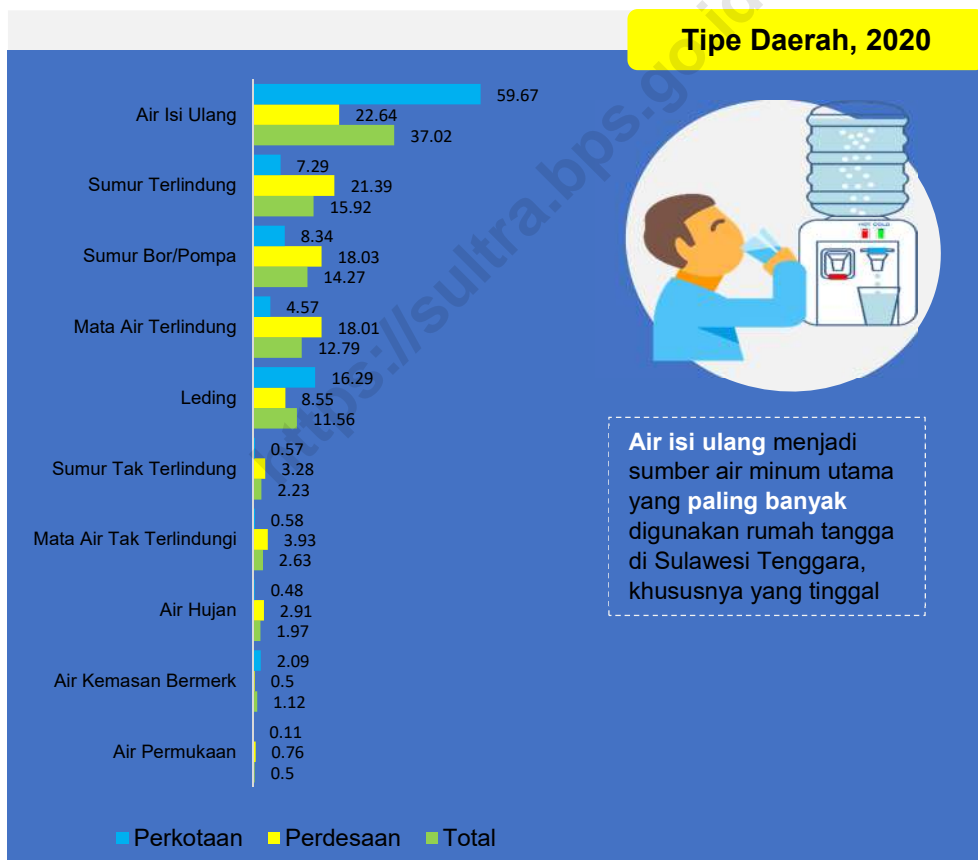
3.1 Air Minum

Air merupakan salah satu elemen yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Kadar air dalam tubuh manusia seharusnya mencapai 60-70 persen. Peran air dan oksigen dalam tubuh manusia yaitu untuk menggerakkan sistem kinerja dari seluruh organ-organ tubuh yang ada. Jika kekurangan air atau oksigen, maka tubuh akan mengeluarkan alarm sebagai petanda bahwa mesin kekurangan bahan bakar, dan dapat berdampak pada gangguan kesehatan. Oleh karena itu, manusia perlu memperhatikan asupan air dalam tubuh yang dapat diperoleh dari air minum atau makanan yang mengandung cairan.

Selain untuk memenuhi kebutuhan air dalam tubuh, air juga biasa digunakan dalam aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga seperti mandi, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Dalam hal ini, rumah

tangga membutuhkan akses terhadap sumber air bersih yang memenuhi standar, baik dari segi kuantitas dan kualitas, terutama akses sumber air minumannya. Absennya air bersih menjadi salah satu awal dari munculnya persoalan kesehatan dalam masyarakat, seperti stunting. Anak-anak yang tinggal di hunian tanpa akses air minum dan sanitasi yang layak menjadi lebih rentan terhadap stunting. Oleh karena itu, akses terhadap air minum yang layak menjadi salah satu kriteria rumah layak huni.

Gambar 3.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama dan Tipe Daerah, 2020

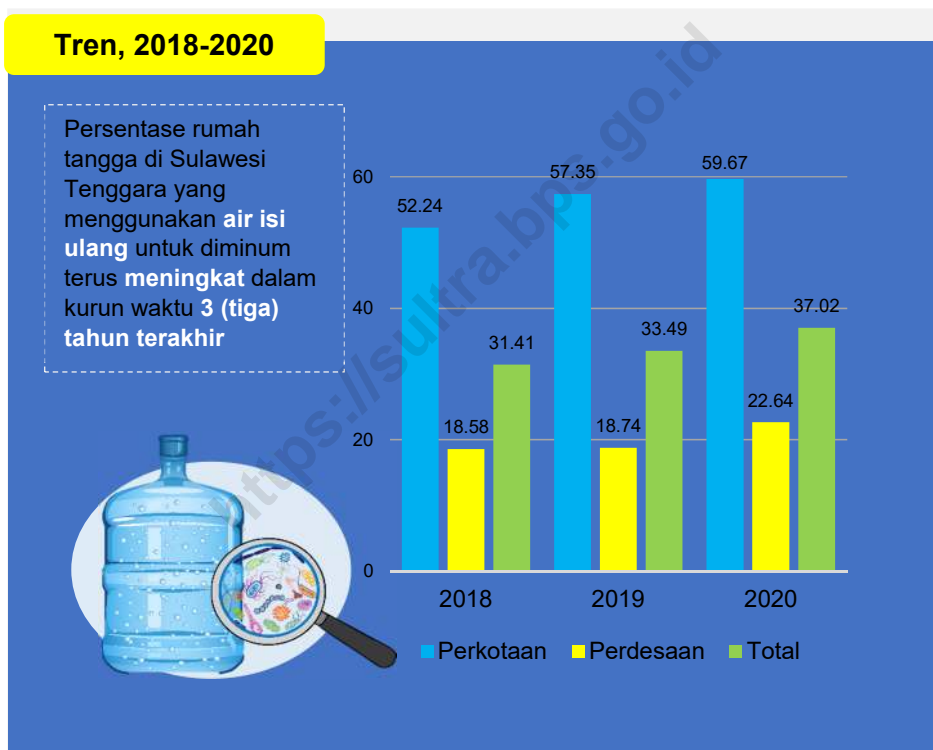


Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Berdasarkan data hasil Susenas Maret 2020, menunjukkan bahwa sekitar 37,02 persen rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum utamanya. Penggunaan air isi ulang ini

sebagai sumber air minum utama bahkan lebih banyak di daerah perkotaan, yaitu sekitar 59,67 persen, sementara di daerah perdesaan hanya sekitar 22,64 persen. Dengan kata lain, ada 6 dari 10 rumah tangga di daerah perkotaan yang memilih air isi ulang sebagai sumber air minum utamanya. Selain air isi ulang, rumah tangga di daerah perdesaan juga banyak yang menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air minum utamanya, yaitu sekitar 21,39 persen.

Gambar 3.2
 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Isi Ulang sebagai Sumber Air Minum Utama Menurut Tipe Daerah, 2018-2020



Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Jika dilihat dalam 3 (tiga) tahun terakhir, persentase rumah tangga yang menjadikan air isi ulang sebagai sumber air minum utamanya terus meningkat, yaitu dari 31,41 persen di tahun 2018 menjadi 37,02 persen di tahun 2020. Kondisi peningkatan persentase penggunaan air isi ulang ini terjadi di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Tingginya persentase rumah tangga yang menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum utamanya juga terlihat di

level kabupaten/kota. Di Kota Kendari, persentase rumah tangga yang menggunakan air isi ulang untuk air minum pada tahun 2020 mencapai 67,81 persen. Penggunaan sumber air minum utama dari air isi ulang juga cukup banyak dilakukan oleh rumah tangga di beberapa kabupaten/kota seperti Kota Baubau (56,14 persen), Kabupaten Konawe Utara (46,28 persen), Kabupaten Bombana (45,73 persen), dan Kabupaten Kolaka (44 persen).

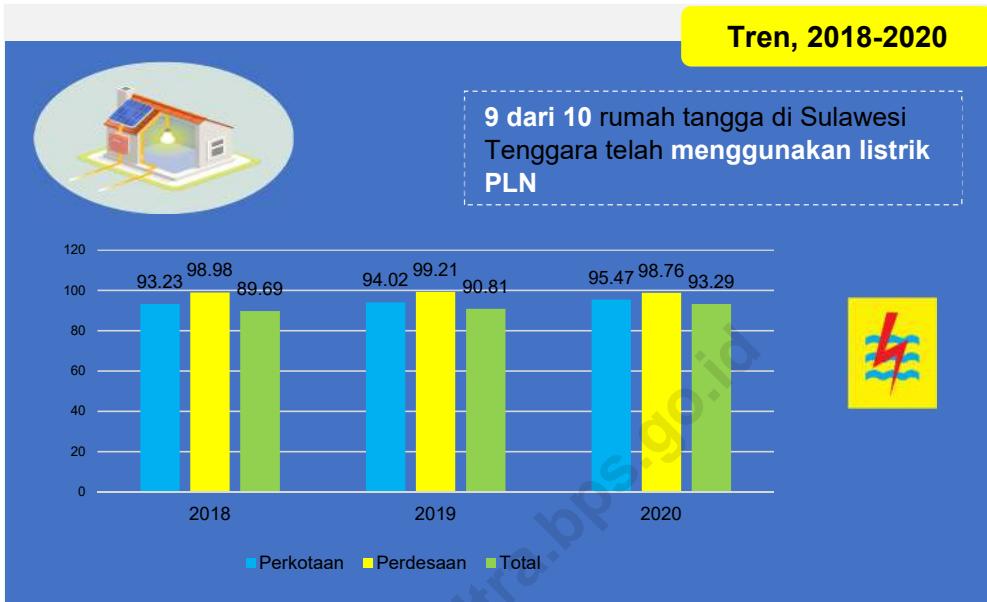
Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum utama patut menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat. Air isi ulang memang menjadi salah satu alternatif yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan air minum rumah tangga. Selain penggunaannya yang praktis, harganya juga relatif lebih terjangkau dari air kemasan bermerk. Namun di balik itu, terdapat berbagai potensi masalah air isi ulang, kualitas air yang digunakan belum tentu terjamin bahwa airnya tidak tercemar. Jika air sudah tercemar, bakteri atau mikroba lain yang ada di dalam air semakin berkembang, pada akhirnya akan meningkatkan sederet penyakit berbahaya bagi yang mengosumsi air tersebut.

3.2 Sumber Penerangan

Di era peradaban modern saat ini, listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Hampir semua aktivitas sehari-hari yang dilakukan manusia saat ini membutuhkan tenaga listrik.

Dalam konteks perumahan, jaringan listrik merupakan salah satu utilitas umum yang mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Rumah tangga dapat memanfaatkan jaringan listrik yang ada untuk sumber penerangan dalam rumahnya, khususnya di malam hari saat tidak ada cahaya matahari langsung. Penerangan atau pencahayaan yang cukup menjadi salah satu kriteria rumah yang layak huni. Selain itu, jaringan listrik juga dapat digunakan untuk penerangan di jalan umum sekitar perumahan dan permukiman.

Gambar 3.3
 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Utama Menggunakan Listrik PLN Menurut Tipe Daerah, 2018-2020



Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Sumber penerangan rumah tangga dibedakan menjadi listrik PLN (dengan dan tanpa meteran), listrik non-PLN, dan bukan listrik. Data ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat keterjangkauan jaringan listrik di tiap daerah. Data Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa hampir semua rumah tangga di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara, baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan, telah menggunakan sumber utama penerangan listrik khususnya listrik PLN (baik dengan maupun tanpa meteran).

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, terdapat peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber utama penerangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi jaringan listrik di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah semakin baik. Walaupun demikian masih terdapat rumah tangga yang menggunakan sumber utama penerangannya berupa listrik yang bersumber selain dari PLN (non-PLN). Penggunaan listrik

non-PLN sebagai sumber penerangan utama masih cukup tinggi di beberapa kabupaten seperti di Kabupaten Konawe Kepulauan (18,70 persen), Kabupaten Muna Barat (12,61 persen), dan Kabupaten Buton Selatan (11,59 persen). Dalam hal ini, pemerintah melalui PLN diharapkan dapat memperkuat pasokan listrik untuk kebutuhan rumah tangga khususnya di daerah-daerah tersebut.

3.3 Sanitasi

Sanitasi merupakan salah satu dari tiga faktor paling fundamental yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, selain higienitas dan air bersih. Sanitasi dapat didefinisikan sebagai upaya penyediaan sarana dan pelayanan untuk pembuangan limbah yang berasal dari manusia termasuk urin dan feses/tinja yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kesehatan manusia. Sanitasi dasar (sanitasi minimum) yang diperlukan untuk mencapai lingkungan yang sehat bagi masyarakat meliputi sarana pembuangan kotoran manusia, pembuangan air limbah rumah tangga, serta sarana dan layanan pengelolaan sampah rumah tangga.

Pemenuhan atas kebutuhan sanitasi dasar pada lingkungan rumah tangga merupakan salah satu hal penting dalam pencapaian kesehatan masyarakat. Rumah merupakan lingkungan terdekat bagi manusia sehingga sanitasi dasar di rumah sangat erat kaitannya dengan tingkat kesehatan jasmani dan rohani manusia tersebut. Semakin baik sanitasi lingkungan rumah tangga, maka semakin baik pula tingkat kesehatan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, upaya sanitasi sepatutnya dimulai dari rumah tangga itu sendiri.

Komponen dari sanitasi dasar yang akan dibahas pada sub bab ini adalah sarana/fasilitas tempat pembuangan kotoran manusia (tinja) atau tempat buang air besar (BAB). Keberadaan sarana/fasilitas untuk tempat BAB pada rumah tangga dapat mengurangi risiko penyebaran berbagai penyakit yang dibawa dari kotoran manusia. Indikator kelayakan dari fasilitas tempat BAB meliputi jenis pemakaian/penggunaan tempat BAB, jenis kloset yang digunakan, dan jenis tempat pembuangan akhir tinja.

3.3.1 Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar

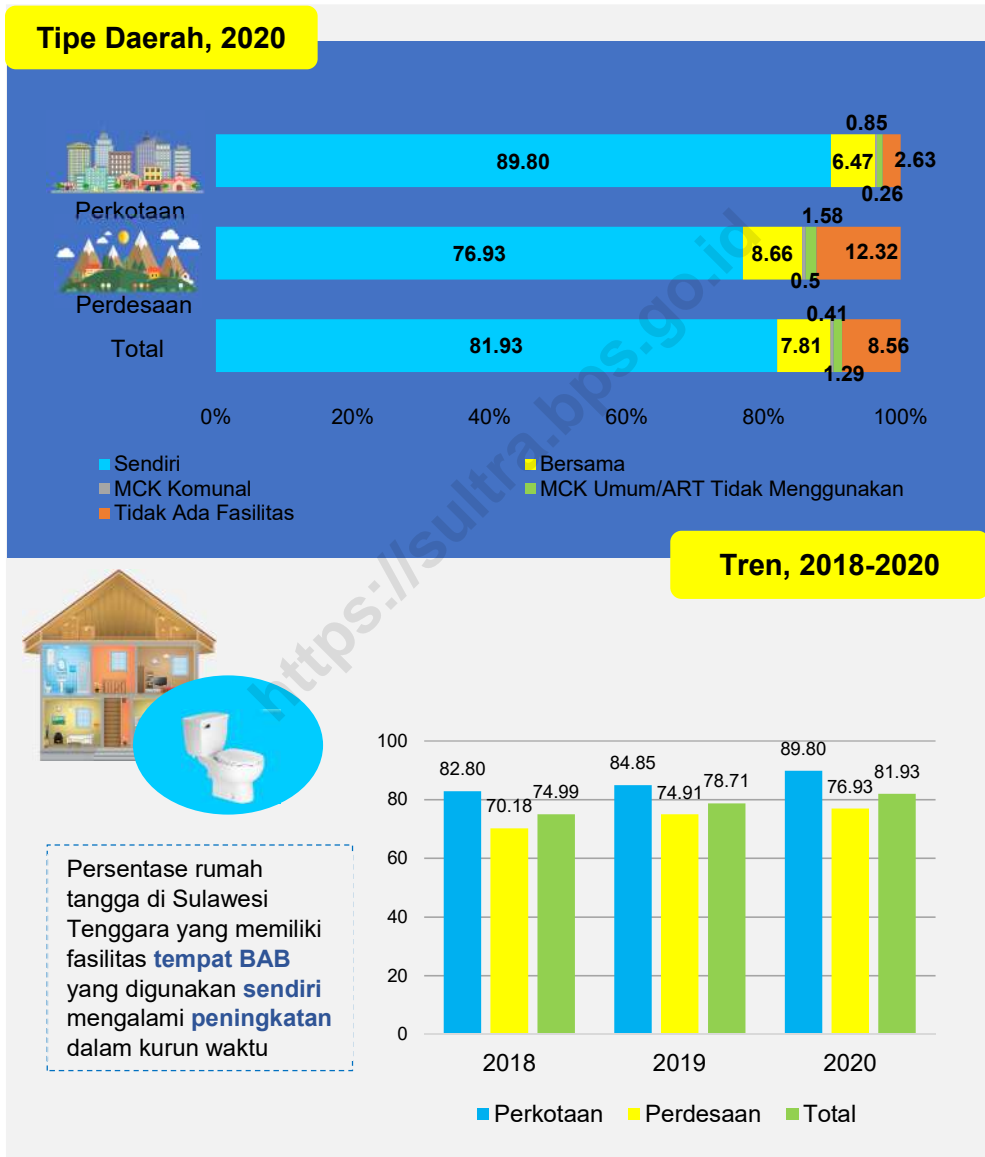
Penyediaan sarana/fasilitas tempat BAB merupakan bagian yang penting dari sanitasi lingkungan. Kotoran manusia dapat mengandung virus, bakteri, dan parasit, yang dapat menjangkiti orang lain melalui air dan/atau makanan yang telah terkontaminasi secara langsung ataupun tidak langsung (melalui lalat). Berbagai penyakit yang dapat disebabkan oleh kotoran manusia antara lain: thypus, disentri, kolera, bermacam-macam cacing, schistosomiasis, dan sebagainya. Untuk mencegah terjadinya kontaminasi kotoran terhadap lingkungan, maka harus disediakan sarana/ fasilitas pembuangan yang layak. Berdasarkan jenis penggunaannya, kriteria fasilitas tempat BAB yang layak, di antaranya adalah yang digunakan sendiri, bersama dengan rumah tangga tertentu, atau MCK Komunal yang digunakan oleh sekelompok rumah tangga tertentu yang berada dalam lokasi yang sama/berdekatan.

Berdasarkan data Susenas Maret 2020, tercatat ada 8 dari 10 rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memiliki fasilitas tempat BAB yang digunakan oleh anggota rumah tangganya sendiri. Persentasenya lebih besar di daerah perkotaan (89,80 persen) dibandingkan di daerah perdesaan (76,93 persen). Jika dilihat selama periode 2018-2020, persentasenya pun terus mengalami peningkatan, baik di daerah perkotaan, di daerah perdesaan, maupun secara total provinsi.

Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat BAB dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kondisi yang cukup baik. Akan tetapi, pada tahun 2020 juga tercatat masih terdapat sekitar 8,56 persen rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum memiliki fasilitas tempat BAB. Pada daerah perdesaan, persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat BAB jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan, yaitu mencapai 12,32 persen sedangkan di perkotaan hanya 2,63 persen. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah maupun masyarakat. Tanpa adanya fasilitas tempat BAB, kesehatan lingkungan dan masyarakat pun terancam. Kotoran manusia yang tidak dibuang pada tempatnya, dapat menyebabkan lingkungan tercemar dan mengundang

munculnya berbagai macam penyakit serta dapat mengganggu tumbuh kembang anak (risiko *stunting*).

Gambar 3.4
 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penggunaan Fasilitas Tempat BAB dan Tipe Daerah, 2018-2020



Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Di antara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi memiliki persentase tertinggi untuk rumah tangga yang memiliki dan memanfaatkan sendiri fasilitas tempat BAB-nya, yaitu sekitar 93,5 persen di tahun 2020. Kabupaten Kolaka memiliki persentase tertinggi kedua setelah Kabupaten Wakatobi untuk rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat BAB dan dimanfaatkan oleh ART-nya sendiri, yaitu sebesar 88,31 persen di tahun 2020. Namun, persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB di Kabupaten Kolaka juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 8,29 persen.

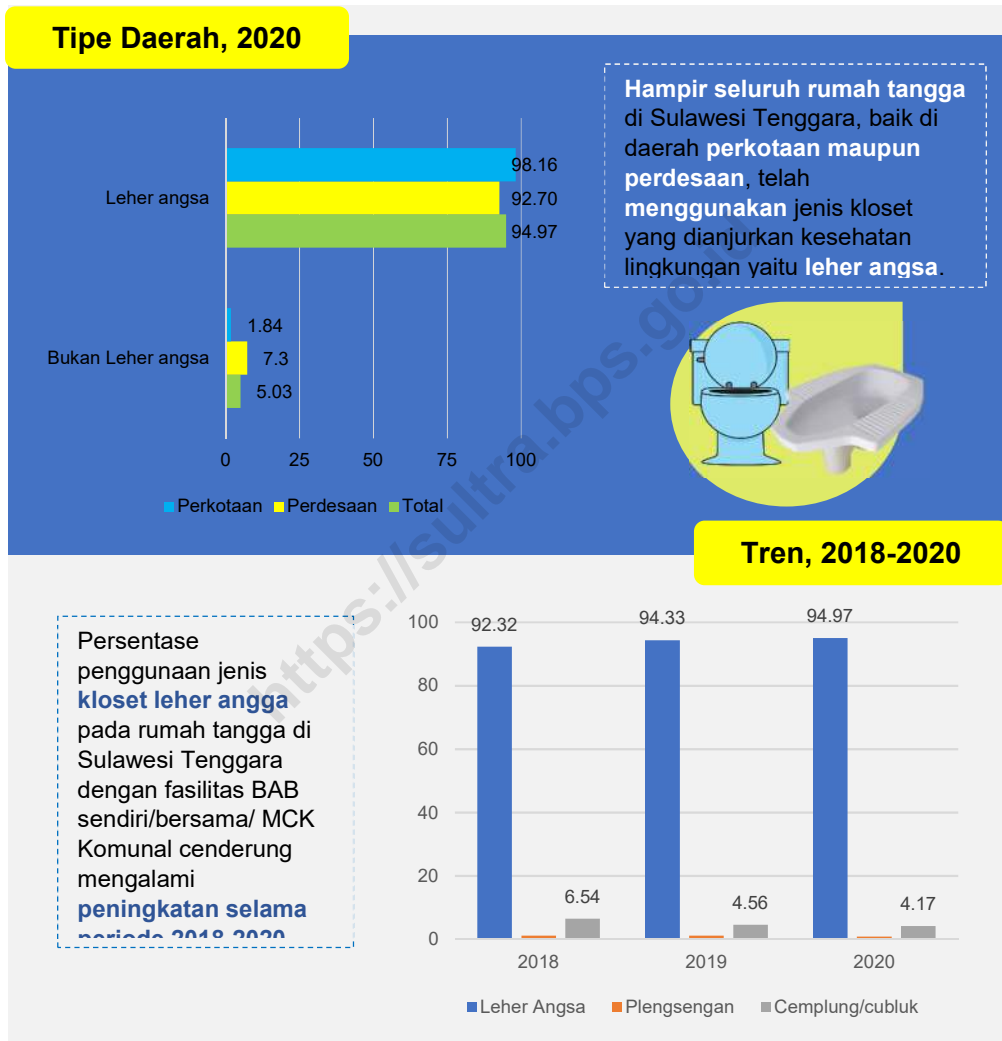
Sementara itu, kabupaten yang memiliki persentase terendah untuk rumah tangga yang memiliki dan memanfaatkan sendiri fasilitas tempat BAB-nya adalah Kabupaten Muna, yaitu sebesar 68,8 persen, dan diikuti oleh daerah pemekarannya yaitu Kabupaten Muna Barat dengan persentase sebesar 69,97 persen. Persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat BAB untuk kedua kabupaten ini adalah masing-masing sebesar 14,84 persen dan 14,58 persen.

3.3.2 Jenis Kloset

Selain dilihat berdasarkan penggunaannya, fasilitas tempat BAB yang sehat juga dapat dilihat berdasarkan jenis kloset yang digunakan. Dalam Susenas, jenis kloset dirinci menjadi leher angsa, plengsengan dengan tutup, plengsengan tanpa tutup, dan cemplung/cubluk. Jenis kloset yang paling baik berdasarkan syarat kloset sehat yang telah ditetapkan oleh Depkes RI (2004), yaitu antara lain: 1) tidak mencemari sumber air minum, letak lubang penampung berjarak 10-15 meter dari sumber air minum; 2) tidak berbau dan tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus; 3) cukup luas dan landai/miring ke arah lubang jongkok/duduk sehingga tidak mencemari tanah atau lantai di sekitarnya; 4) mudah dibersihkan dan aman penggunaannya; 5) dilengkapi dinding dan atap pelindung, dinding kedap air dan berwarna; 6) cukup penerangan; 7) lantai kedap air; (8) ventilasi cukup baik; dan 9) tersedia air dan alat pembersih. Berdasarkan persyaratan tersebut, kloset leher angsa merupakan jenis yang terbaik yang dianjurkan untuk digunakan, terutama pada daerah yang padat penduduk dan cukup air. Kloset jenis ini memiliki lubang yang berbentuk lengkungan (seperti

leher angsa), sehingga akan terisi air yang berguna sebagai penyumbat yang mencegah bau busuk serta masuknya binatang-binatang kecil.

Gambar 3. 5
Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB Sendiri/
Bersama/MCK Komunal Menurut Jenis Kloset dan Tipe Daerah, 2018-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 3.5, jenis kloset leher angsa paling banyak ditemukan pada rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan fasilitas tempat BAB sendiri/bersama/MCK Komunal, yaitu sekitar 94,97 persen. Begitu juga dengan kondisi di daerah perkotaan dan

perdesaan. Hanya saja, persentase penggunaan kloset leher angsa di daerah perkotaan (98,16 persen) lebih tinggi dibandingkan persentase di daerah perdesaan (92,7 persen). Namun masih ada sekitar 4,17 persen rumah tangga dengan fasilitas BAB sendiri/bersama/MCK Komunal di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menggunakan jenis kloset cemplung/cebluk, terutama oleh rumah tangga di daerah perdesaan (sekitar 6,11 persen). Kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat jenis kloset cemplung/cebluk masih belum memenuhi persyaratan jamban yang sehat karena menimbulkan gangguan bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap tersebut dapat mengundang lalat dan serangga lain yang dapat menjadi sumber penularan beberapa penyakit.

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2020, sebagian besar rumah tangga dengan fasilitas tempat BAB sendiri/bersama/MCK Komunal telah menggunakan jenis kloset yang sesuai dengan kriteria jamban kesehatan, yaitu jenis kloset leher angsa. Namun, masih ada beberapa kabupaten/kota yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena penggunaan jenis kloset yang belum memenuhi kriteria kesehatan jamban masih cukup tinggi, seperti Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Kepulauan.

3.3.3 Tempat Pembuangan Akhir Tinja (TPAT)

Kriteria terakhir dan yang paling penting dari fasilitas tempat BAB yang sehat adalah tempat pembuangan akhir tinja (TPAT). TPAT yang memenuhi standar kesehatan adalah yang tertutup dan dilapisi dengan semen di bagian sisi-sisi dan alasnya. TPAT yang tidak tertutup akan menimbulkan bau dan dapat menyebarkan kuman penyakit di sekitar tempat tinggal. Selain dapat mengganggu nilai estetika lingkungan, TPAT di tempat yang terbuka juga rentan menjadi penyebab kuman penyakit, seperti kolera, disentri, dan sebagainya. Ada beberapa jenis TPAT yang tercakup dalam Susenas, tangki septik, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),

kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya. Adapun jenis TPAT yang memenuhi kriteria kesehatan menurut TPB (Tujuan 11.1) adalah TPAT IPAL dan tangki septik.

Gambar 3.6

Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas BAB Sendiri/Bersama/MCK Komunal Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja (TPAT) dan Tipe Daerah, 2018-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2020 pada Gambar 3.6, terlihat bahwa sekitar 89,66 persen rumah tangga dengan fasilitas BAB sendiri/bersama/MCK Komunal di Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan TPAT jenis tangki septik. Rumah tangga dengan fasilitas BAB sendiri/bersama/MCK Komunal yang menggunakan TPAT jenis tangki septik dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang menggunakan TPAT yang telah sesuai dengan kriteria kesehatan. Adapun sisanya atau sekitar 10,34 persen rumah tangga dengan fasilitas BAB, sendiri/bersama/MCK Komunal belum menggunakan TPAT yang sesuai dengan kriteria kesehatan, yaitu antara lain kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya.

Jika dilihat menurut tipe daerah, sebagian besar rumah tangga baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan telah menggunakan fasilitas BAB dan TPAT yang memenuhi kriteria kesehatan. Namun, persentase rumah tangga dengan fasilitas BAB sendiri/bersama/MCK Komunal dan TPAT jenis tangki septik di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Angkanya di daerah perkotaan mencapai 95,89 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 85,23 persen. Sebaliknya, persentase rumah tangga dengan fasilitas BAB sendiri/bersama/MCK Komunal dan TPAT jenis lubang tanah justru lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Berdasarkan Permen PUPR No. 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penggunaan TPAT jenis lubang tanah oleh rumah tangga di daerah perdesaan ini diperbolehkan sepanjang kepadatan penduduk di lingkungan setempat masih rendah atau sebanyak 25 jiwa/Ha.

Jika melihat tren selama 3 (tiga) tahun terakhir, dari tahun 2018 hingga tahun 2020, sanitasi rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal fasilitas tempat BAB bagian bawah (TPAT) menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pada persentase rumah tangga dengan fasilitas BAB sendiri/bersama/MCK Komunal dan TPAT jenis tangki septik dari tahun ke tahun. Sebaliknya persentase rumah tangga dengan fasilitas BAB sendiri/bersama/MCK Komunal dan TPAT jenis lubang tanah terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Capaian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal TPAT juga telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Berdasarkan data hasil Susenas Maret 2020, persentase rumah tangga dengan fasilitas BAB sendiri/bersama/MCK Komunal dan TPAT jenis tangki septik pada hampir semua kabupaten/kota melebihi 80 persen, hanya ada 2 kabupaten yang persentasenya kurang dari 80 persen. Kota Baubau merupakan wilayah dengan persentase tertinggi untuk rumah tangga pengguna fasilitas BAB sendiri/bersama/MCK Komunal dan TPAT jenis tangki septik yaitu sebesar 98,93 persen, yang diikuti Kota Kendari dengan persentase sebesar 96,94 persen. Sementara itu, wilayah dengan persentase terendah untuk rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB sendiri/bersama/MCK Komunal dan TPAT jenis tangki septik adalah Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton Utara, masing-masing sebesar 75,34 persen dan 76,70 persen. Kedua kabupaten ini juga memiliki persentase yang cukup tinggi untuk rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB sendiri/bersama/MCK komunal dan TPAT jenis lubang tanah, yaitu masing-masing sebesar 23,61 persen dan 22,03 persen.

Tabel 3. 1
 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan
 Sumber Air Minum Utama, 2018

Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Air kemasan bermerek	1,46	0,12	0,63
Air isi ulang	52,24	18,58	31,41
Leding	21,88	7,82	13,18
Sumur bor/pompa	8,20	12,46	10,83
Sumur terlindung	7,66	26,53	19,34
Sumur tak terlindung	1,17	7,53	5,11
Mata air terlindung	5,54	17,73	13,08
Mata air tak terlindung	0,45	5,08	3,32
Air permukaan (sungai, danau/waduk, kolam, irigasi)	0,04	0,90	0,57
Air hujan	1,36	3,25	2,53

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018

Tabel 3. 2
 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan
 Sumber Air Minum Utama, 2019

Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Air kemasan bermerek	1,53	0,60	0,95
Air isi ulang	57,35	18,74	33,49
Leding	17,68	8,45	11,98
Sumur bor/pompa	7,75	13,72	11,44
Sumur terlindung	8,57	24,00	18,11
Sumur tak terlindung	1,12	6,87	4,68
Mata air terlindung	4,33	19,36	13,62
Mata air tak terlindung	0,14	4,12	2,60
Air permukaan (sungai, danau/waduk, kolam, irigasi)	0,00	1,02	0,63
Air hujan	1,53	3,13	2,52

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2019

Tabel 3. 3
 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan
 Sumber Air Minum Utama, 2020

Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Air kemasan bermerek	2,09	0,50	1,12
Air isi ulang	59,67	22,64	37,02
Leding	16,29	8,55	11,56
Sumur bor/pompa	8,34	18,03	14,27
Sumur terlindung	7,29	21,39	15,92
Sumur tak terlindung	0,57	3,28	2,23
Mata air terlindung	4,57	18,01	12,79
Mata air tak terlindung	0,58	3,93	2,63
Air permukaan (sungai, danau/waduk, kolam, irigasi)	0,11	0,76	0,50
Air hujan	0,48	2,91	1,97

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Tabel 3. 4
 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan
 Sumber Air Minum Utama, 2020

Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum				
	Air kemasan bermerk	Air isi ulang	Leding	Sumur bor/ pompa	Sumur terlindung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Buton	0,32	16,99	27,26	6,05	8,42
Muna	0,55	20,58	11,11	15,99	30,14
Konawe	0,67	33,10	4,45	27,24	21,38
Kolaka	0,71	44,00	5,61	22,52	8,07
Konawe Selatan	0,47	30,59	0,00	13,70	29,83
Bombana	2,10	45,73	12,79	14,46	5,16
Wakatobi	1,33	32,03	6,26	14,71	23,69
Kolaka Utara	0,39	30,42	21,91	5,83	3,90
Buton Utara	0,16	35,95	1,40	4,99	34,13
Konawe Utara	0,59	46,28	0,00	2,47	5,35
Kolaka Timur	0,00	24,63	14,81	29,40	10,68
Konawe Kepulauan	0,00	23,89	11,01	3,65	10,95
Muna Barat	0,33	6,33	3,49	29,43	51,58
Buton Tengah	2,56	23,79	47,76	7,26	9,65
Buton Selatan	0,00	0,63	24,91	9,33	15,56
Kendari	3,00	67,81	8,97	5,53	7,16
Baubau	1,67	56,14	26,55	6,99	4,91
Sulawesi Tenggara	1,12	37,02	11,56	14,27	15,92

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Lanjutan Tabel 3.4

Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum				
	Sumur tak terlindung	Mata air terlindung	Mata air tak terlindung	Air permukaan	Air hujan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Buton	1,99	31,93	5,61	0,32	1,11
Muna	1,53	8,70	2,41	0,00	8,99
Konawe	3,75	8,20	0,88	0,34	0,00
Kolaka	1,30	13,80	2,22	1,76	0,00
Konawe Selatan	5,82	12,83	6,46	0,31	0,00
Bombana	1,63	16,76	0,47	0,91	0,00
Wakatobi	2,58	3,30	1,53	0,00	14,57
Kolaka Utara	0,22	30,49	5,17	1,66	0,00
Buton Utara	3,30	15,62	2,25	2,20	0,00
Konawe Utara	4,22	32,11	8,28	0,69	0,00
Kolaka Timur	2,60	12,95	4,38	0,43	0,12
Konawe Kepulauan	1,15	48,96	0,17	0,23	0,00
Muna Barat	1,44	5,13	0,31	1,31	0,64
Buton Tengah	2,62	4,75	1,23	0,00	0,38
Buton Selatan	1,07	25,54	0,35	0,00	22,62
Kendari	0,77	5,28	1,47	0,00	0,00
Baubau	0,26	3,41	0,06	0,00	0,00
Sulawesi Tenggara	2,23	12,79	2,63	0,50	1,97

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Tabel 3.5
 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan
 Sumber Penerangan Utama, 2018 – 2020

Sumber Utama Penerangan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tahun 2018			
Listrik PLN	98,98	89,69	93,23
Listrik non-PLN	0,74	7,94	5,20
Bukan listrik	0,28	2,37	1,57
Tahun 2019			
Listrik PLN	99,21	90,81	94,02
Listrik non-PLN	0,76	7,13	4,70
Bukan listrik	0,02	2,06	1,28
Tahun 2020			
Listrik PLN	98,76	93,39	95,47
Listrik non-PLN	1,11	5,26	3,64
Bukan listrik	0,13	1,36	0,88

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Tabel 3.6
 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan
 Sumber Utama Penerangan, 2020

Kabupaten/Kota	Sumber Utama Penerangan		
	Listrik PLN	Listrik non-PLN	Bukan Listrik
(1)	(2)	(3)	(4)
Buton	98,99	0,16	0,85
Muna	91,42	5,77	2,82
Konawe	99,09	0,35	0,56
Kolaka	96,52	2,47	1,02
Konawe Selatan	95,31	3,61	1,08
Bombana	97,95	1,39	0,66
Wakatobi	93,69	5,85	0,46
Kolaka Utara	89,52	9,43	1,05
Buton Utara	94,77	3,06	2,17
Konawe Utara	100,00	0,00	0,00
Kolaka Timur	93,10	6,12	0,78
Konawe Kepulauan	80,06	18,70	1,24
Muna Barat	86,06	12,61	1,33
Buton Tengah	93,41	6,26	0,33
Buton Selatan	86,91	11,59	1,50
Kendari	99,83	0,00	0,17
Baubau	99,73	0,17	0,10
Sulawesi Tenggara	95,47	3,64	0,88

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Tabel 3.7
 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah, Kepemilikan dan Penggunaan Fasilitas Tempat BAB, 2018

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sendiri	82,80	70,18	74,99
Bersama	10,66	7,96	8,99
Umum/Komunal	1,39	2,73	2,22
Ada, ART tidak menggunakan	0,00	0,07	0,05
Tidak ada fasilitas	5,16	19,07	13,77

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018

Tabel 3.8
 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah, Kepemilikan dan Penggunaan Fasilitas Tempat BAB, 2019

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sendiri	84,85	74,91	78,71
Bersama	10,73	6,71	8,25
Umum/Komunal	0,83	1,86	1,47
Ada, ART tidak menggunakan	0,00	0,04	0,02
Tidak ada fasilitas	3,58	16,48	11,55

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2019

Tabel 3.9
 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah, Kepemilikan dan Penggunaan Fasilitas Tempat BAB, 2020

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sendiri	89,80	76,93	81,93
Bersama	6,47	8,66	7,81
Umum/Komunal	0,97	1,95	1,57
Ada, ART tidak menggunakan	0,14	0,13	0,13
Tidak ada fasilitas	2,63	12,32	8,56

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

FASILITAS PERUMAHAN SEHAT DAN LAYAK HUNI

Tabel 3.10
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Kepemilikan dan
Penggunaan Fasilitas Tempat BAB, 2020

Kabupaten/Kota	Fasilitas Tempat Buang Air Besar				
	Sendiri	Bersama	Umum/ Komunal	Ada, ART tidak menggunakan	Tidak ada fasilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Buton	75,38	8,00	6,82	0,30	9,50
Muna	68,80	13,88	1,75	0,73	14,84
Konawe	78,34	12,30	2,11	0,09	7,17
Kolaka	88,31	2,39	0,94	0,08	8,29
Konawe Selatan	82,38	6,03	0,18	0,00	11,41
Bombana	82,22	4,38	0,82	0,43	12,15
Wakatobi	93,50	1,75	0,33	0,00	4,42
Kolaka Utara	82,66	6,82	0,13	0,00	10,39
Buton Utara	74,37	6,62	6,28	0,00	12,73
Konawe Utara	80,55	5,18	0,83	0,00	13,44
Kolaka Timur	86,40	5,44	1,29	0,00	6,88
Konawe Kepulauan	86,14	1,91	0,00	1,04	10,92
Muna Barat	69,97	12,36	2,92	0,17	14,58
Buton Tengah	81,69	3,58	3,09	0,02	11,62
Buton Selatan	76,02	6,67	5,84	0,00	11,47
Kendari	86,94	10,31	0,83	0,00	1,92
Baubau	85,30	11,14	1,66	0,00	1,90
Sulawesi Tenggara	81,93	7,81	1,57	0,13	8,56

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Tabel 3.11
 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB
 Sendiri/Bersama Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kloset, 2018

Jenis Kloset yang Digunakan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Leher angsa	96,83	88,99	92,32
Plengsengan	1,03	0,55	0,75
Plengsengan tanpa tutup	0,28	0,47	0,39
Cemplung/Cubluk	1,86	9,98	6,54

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018

Tabel 3.12
 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB Sendiri/ Bersama/MCK
 Komunal Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kloset, 2019

Jenis Kloset yang Digunakan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Leher angsa	97,90	91,75	94,33
Plengsengan	0,34	0,77	0,59
Plengsengan tanpa tutup	0,60	0,46	0,52
Cemplung/Cubluk	1,16	7,02	4,56

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2019

Tabel 3.13
 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB Sendiri/ Bersama/MCK
 Komunal Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kloset, 2020

Jenis Kloset yang Digunakan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Leher angsa	98,16	92,70	94,97
Plengsengan	0,13	0,68	0,45
Plengsengan tanpa tutup	0,26	0,51	0,41
Cemplung/Cubluk	1,45	6,11	4,17

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Tabel 3.14
 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB Sendiri/ Bersama/MCK
 Komunal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset,2020

Kabupaten/Kota	Jenis Kloset yang Digunakan			
	Leher angsa	Plengsengan	Plengsengan tanpa tutup	Cemplung / Cublik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buton	96,66	0,64	0,77	1,93
Muna	92,17	0,14	1,26	6,43
Konawe	92,65	1,12	0,25	5,98
Kolaka	97,55	0,67	0,00	1,77
Konawe Selatan	90,64	0,39	0,29	8,69
Bombana	96,43	0,00	0,00	3,57
Wakatobi	91,19	0,00	1,04	7,77
Kolaka Utara	96,46	0,66	0,16	2,72
Buton Utara	98,00	0,00	0,00	2,00
Konawe Utara	91,52	0,26	3,96	4,26
Kolaka Timur	96,72	0,17	0,14	2,97
Konawe Kepulauan	81,66	7,90	2,27	8,17
Muna Barat	81,67	2,16	0,43	15,73
Buton Tengah	92,78	0,02	0,22	6,98
Buton Selatan	99,14	0,00	0,00	0,86
Kendari	99,52	0,00	0,20	0,28
Baubau	100,00	0,00	0,00	0,00
Sulawesi Tenggara	94,97	0,45	0,41	4,17

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Tabel 3.15
 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB Sendiri/Bersama
 Menurut Tipe Daerah dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2018

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tangki Septik/IPAL	88,21	80,95	84,03
Kolam/sawah/sungai/ danau/laut	1,70	2,63	2,23
Lobang tanah	9,60	15,40	12,94
Pantai/kebun/lainnya	0,49	1,02	0,80

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018

Tabel 3.16
 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB
 Sendiri/Bersama/MCK Komunal Menurut Tipe Daerah
 dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2019

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tangki Septik/IPAL	93,17	80,39	85,75
Kolam/sawah/sungai/ danau/laut	1,90	2,80	2,42
Lobang tanah	4,87	16,07	11,37
Pantai/kebun/lainnya	0,06	0,74	0,46

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2019

Tabel 3.17
 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB
 Sendiri/Bersama/MCK Komunal Menurut Tipe Daerah
 dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2020

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tangki/Septik	95,89	85,23	89,66
Kolam/sawah/sungai/ danau/laut	2,86	6,44	4,95
Lobang tanah	0,88	7,67	4,84
Pantai/kebun/lainnya	0,37	0,66	0,54

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Tabel 3.18
 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat BAB
 Sendiri/Bersama/MCK Komunal Menurut Kabupaten/Kota
 dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2020

Kabupaten/Kota	Tempat Pembuangan Akhir Tinja			
	Tangki Septik	Kolam/sawah/ sungai/danau/ laut	Lobang tanah	Pantai/ kebun/ lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buton	90,47	0,83	7,13	1,57
Muna	84,74	8,42	6,00	0,84
Konawe	84,14	10,69	5,17	0,00
Kolaka	91,92	1,43	6,32	0,32
Konawe Selatan	82,87	10,84	5,91	0,37
Bombana	95,33	3,75	0,91	0,00
Wakatobi	80,77	10,85	7,16	1,22
Kolaka Utara	94,98	2,35	2,48	0,18
Buton Utara	76,70	1,02	22,03	0,25
Konawe Utara	88,45	2,13	8,20	1,22
Kolaka Timur	95,01	0,42	4,13	0,45
Konawe Kepulauan	87,09	10,80	0,12	1,99
Muna Barat	80,02	4,14	13,35	2,50
Buton Tengah	87,70	5,84	2,83	3,64
Buton Selatan	75,34	0,27	23,61	0,78
Kendari	96,94	3,06	0,00	0,00
Baubau	98,93	0,60	0,47	0,00
Sulawesi Tenggara	89,66	4,95	4,84	0,54

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020



BAB IV

KESEHATAN LINGKUNGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan UU tersebut, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dasar manusia tidak hanya sekedar bertempat tinggal atau menghuni rumah yang layak huni, tetapi juga berada dalam lingkungan yang sehat dan aman. Untuk itu, pemenuhan tempat tinggal/rumah yang layak bagi masyarakat tidak hanya memperhatikan pemenuhan syarat bangunan fisik dan fasilitas yang melengkapinya semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesehatan lingkungan. Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pun diarahkan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Lingkungan merupakan salah satu faktor penentu yang memberikan kontribusi terbesar terhadap derajat kesehatan individu/masyarakat. Kondisi lingkungan yang buruk dan tidak sehat dapat meningkatkan risiko timbulnya berbagai permasalahan pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya kesehatan lingkungan diperlukan untuk dapat mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia dan biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat mencapai kesehatan yang optimal. Adapun lingkungan yang sehat menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, merupakan lingkungan yang bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain: limbah cair; limbah padat; limbah gas; sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratannya; binatang pembawa penyakit; zat kimia yang berbahaya; kebisingan yang melebihi ambang batas; radiasi sinar pengion dan non pengion; air yang tercemar; udara yang tercemar; dan makanan yang terkontaminasi.

Pentingnya isu kesehatan lingkungan dalam kaitannya dengan berbagai aspek khususnya kesehatan, menjadikannya sebagai salah satu target

pembangunan nasional (RPJMN 2020-2024) dan global (TPB). Bab ini membahas beberapa indikator yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan rumah tangga, seperti akses terhadap air minum layak; sanitasi layak, rumah layak huni, dan penggunaan bahan bakar untuk memasak yang menimbulkan polusi tinggi, khususnya kayu bakar.

4.1 Air Minum Layak

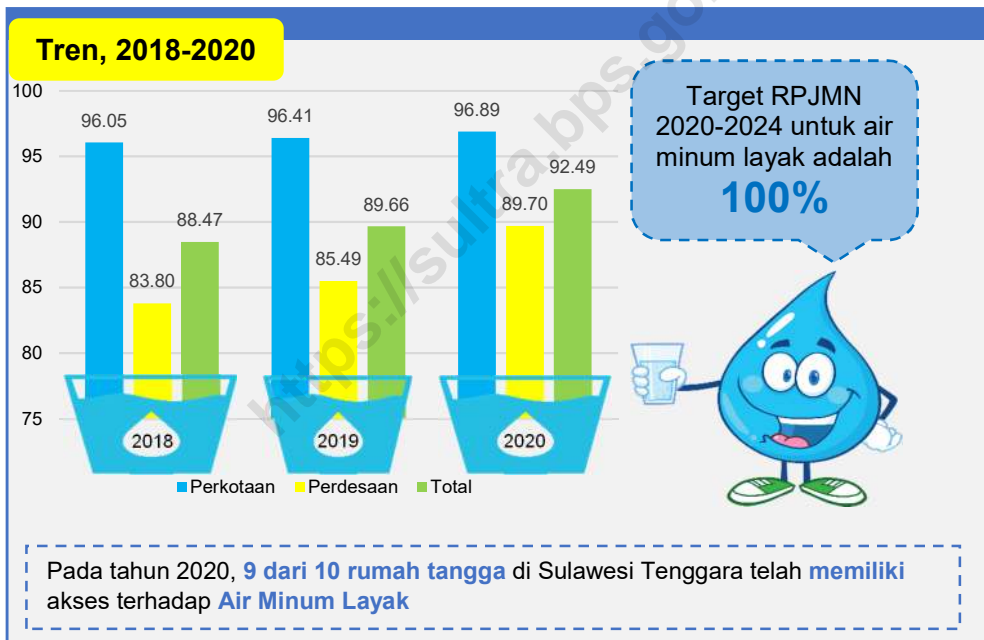
Air minum yang aman dan layak merupakan salah satu indikator kesehatan lingkungan yang sangat penting dalam menunjang kesehatan masyarakat. Akan tetapi, pemenuhan akan kebutuhan air bersih ini masih menjadi salah satu permasalahan di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah pencemaran air bersih. Sumber air yang terkontaminasi beserta sanitasi yang buruk sering kali dikaitkan dengan penularan berbagai penyakit seperti kolera, diare, disentri, hepatitis A, tifoid, dan polio. Penyakit-penyakit ini akan memiliki dampak yang lebih serius bila terjadi pada anak-anak, khususnya balita. Bahkan, minimnya akses terhadap air bersih dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak yang dampaknya akan berpengaruh pada masa yang akan datang.

Permasalahan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak tersebut menjadikan keduanya sebagai agenda prioritas dalam pembangunan global TPB yang tertuang dalam Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) yang menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan ini pada tahun 2030, ditetapkan target-target yang terukur, salah satunya adalah mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Sejalan dengan ini, RPJMN 2020-2024 juga menargetkan pencapaian akses air minum layak menyeluruh di Indonesia dan peningkatan kinerja PDAM untuk menyediakan air layak pada masyarakat.

Perhitungan capaian indikator akses terhadap air minum layak dilakukan dengan menggunakan data Susenas Maret. Mulai tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan menggunakan air minum layak jika sumber utama air yang

digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Begitu pula ketika sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang namun sumber air utama untuk mandi/cuci/dll yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindungi, mata air terlindung, dan air hujan (BPS, 2019). Perbedaan klasifikasi ini dengan yang sebelumnya adalah tidak lagi memasukkan karakteristik jarak ke tempat pembuangan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Gambar 4.1
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Menurut Tipe Daerah, 2018-2020

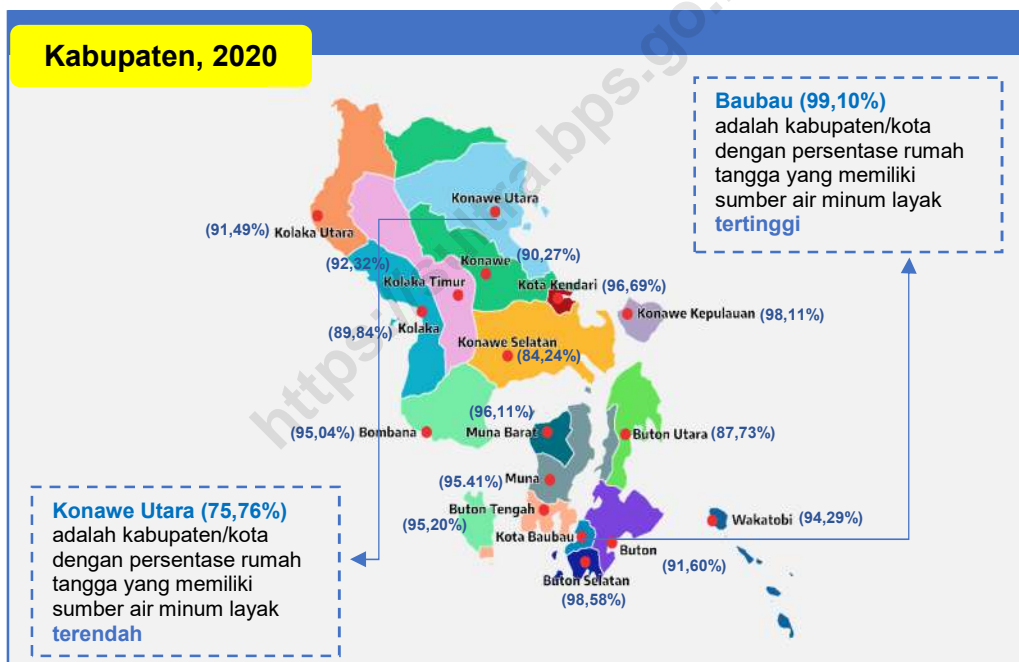


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap air minum layak di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari 88,47 persen di tahun 2018 menjadi 92,49 persen di tahun 2020. Capaian ini tentunya masih belum memenuhi target RPJMN 2020-2024 yang mengharapkan bahwa 100 persen rumah tangga dapat memiliki sumber air minum yang layak.

Masih banyaknya penggunaan air isi ulang untuk air minum menjadi tantangan dalam mencapai akses air minum layak secara menyeluruh di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga saat ini merupakan air isi ulang yang termasuk pada kategori sumber air minum tidak berkelanjutan sedangkan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pencapaian akses air minum berkelanjutan adalah dapat diakses setiap saat ketika dibutuhkan dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan (Kementerian PPN/Bappenas)

Gambar 4.2
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota, 2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020

Capaian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal pemenuhan air minum layak juga telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Berdasarkan data hasil Susenas Maret 2020, di beberapa kabupaten/kota 9 dari 10 rumah tangga telah memiliki sumber air minum layak. Kota Baubau merupakan wilayah dengan persentase tertinggi untuk rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak yaitu sebesar 99,10 persen, yang diikuti

Kabupaten Buton Selatan dengan persentase sebesar 98,58 persen. Sementara itu, wilayah dengan persentase terendah untuk rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak adalah Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Selatan, masing-masing sebesar 75,76 persen dan 84,24 persen.

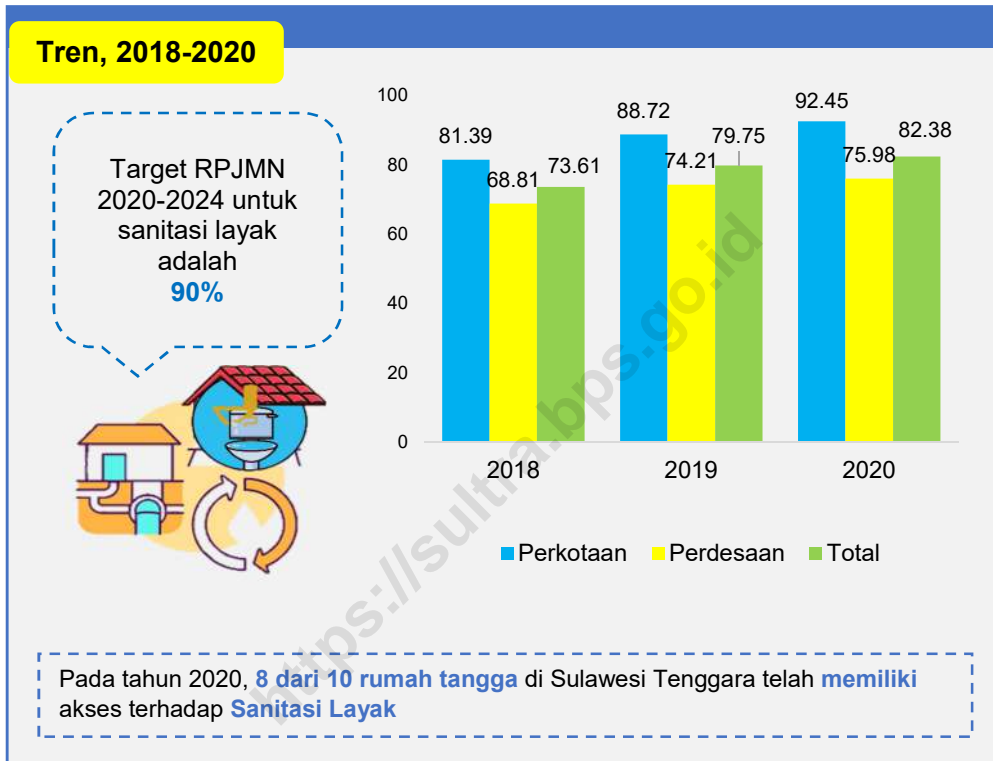
4.2 Sanitasi Layak

Selain air minum yang layak, terpenuhinya sanitasi yang layak juga merupakan indikator kesehatan lingkungan dalam mewujudkan tingkat kesehatan yang tinggi bagi masyarakat. Kedua indikator ini saling berkaitan. Penyediaan fasilitas sanitasi yang layak sangat bergantung pada ketersediaan air minum yang layak. Begitu pun sebaliknya, untuk mendapatkan air minum yang aman diperlukan upaya pengelolaan sanitasi yang baik. Penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi yang layak juga perlu diimbangi dengan perilaku hidup yang bersih atau higienis. Akses air minum dan sanitasi yang tidak layak serta praktik hidup yang tidak higienis tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat yang buruk, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian pada perekonomian akibat produktivitas masyarakat yang rendah. Khususnya pada saat pandemi seperti sekarang ini, air minum dan sanitasi yang aman, serta perilaku higienis mutlak diperlukan untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pada tahun 2030, pembangunan global menargetkan tercapainya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka (Target 6.2 pada TPB).

Fasilitas sanitasi rumah tangga diklasifikasikan layak, jika rumah tangga memiliki dan menggunakan fasilitas tempat BAB yang digunakan hanya oleh ART sendiri, bersama dengan rumah tangga tertentu, atau menggunakan MCK komunal. Kriteria selanjutnya adalah jenis kloset yang digunakan berupa leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL). Seperti halnya klasifikasi air minum layak, indikator ini juga mengalami pengembangan di tahun 2019. Pada pengembangan tersebut, termasuk pula klasifikasi sanitasi layak khusus pada rumah tangga yang tinggal di perdesaan, jika menggunakan fasilitas buang air besar sendiri atau bersama rumah tangga lain dengan jenis kloset leher angsa

namun tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan lubang tanah (BPS, 2019).

Gambar 4.3
 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah, 2018-2020

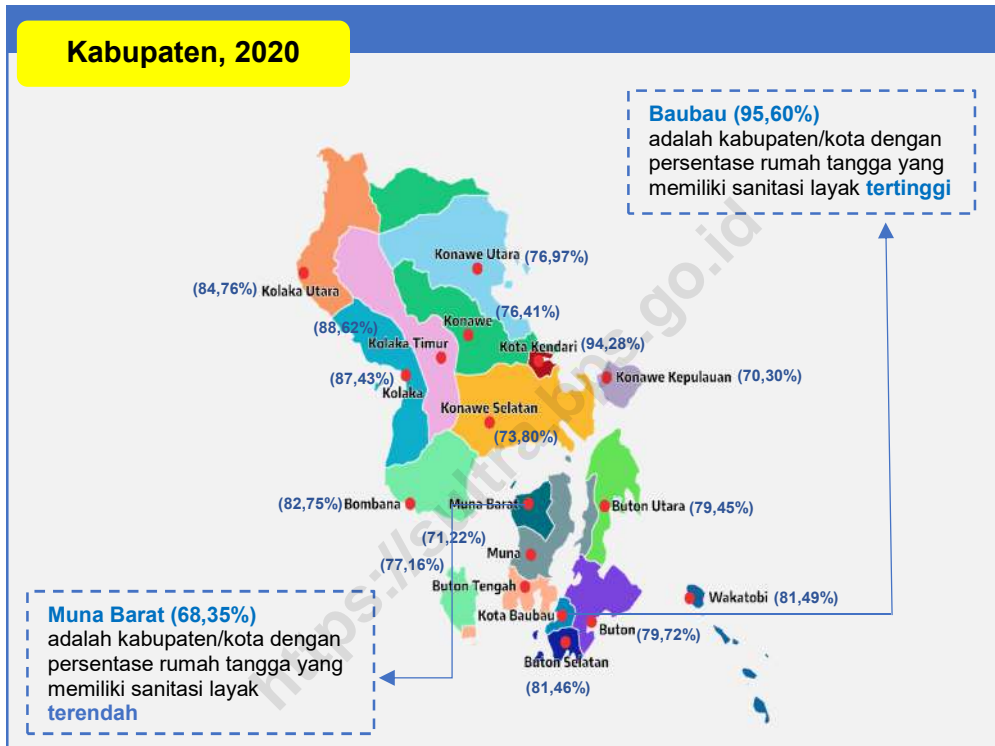


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari 73,61 persen di tahun 2018 menjadi 82,38 persen di tahun 2020. Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dalam 3 (tiga) tahun terakhir jauh lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Pada tahun 2020 persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak untuk daerah perkotaan telah memenuhi target RPJMN 2020-2024 namun kondisi sanitasi pada rumah tangga yang tinggal di daerah perdesaan masih jauh dari target yang

ingin dicapai oleh RPJMN 2020-2024 yaitu 90 persen rumah tangga seharusnya dapat memiliki sanitasi yang layak.

Gambar 4.4
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak
Menurut Kabupaten/Kota, 2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

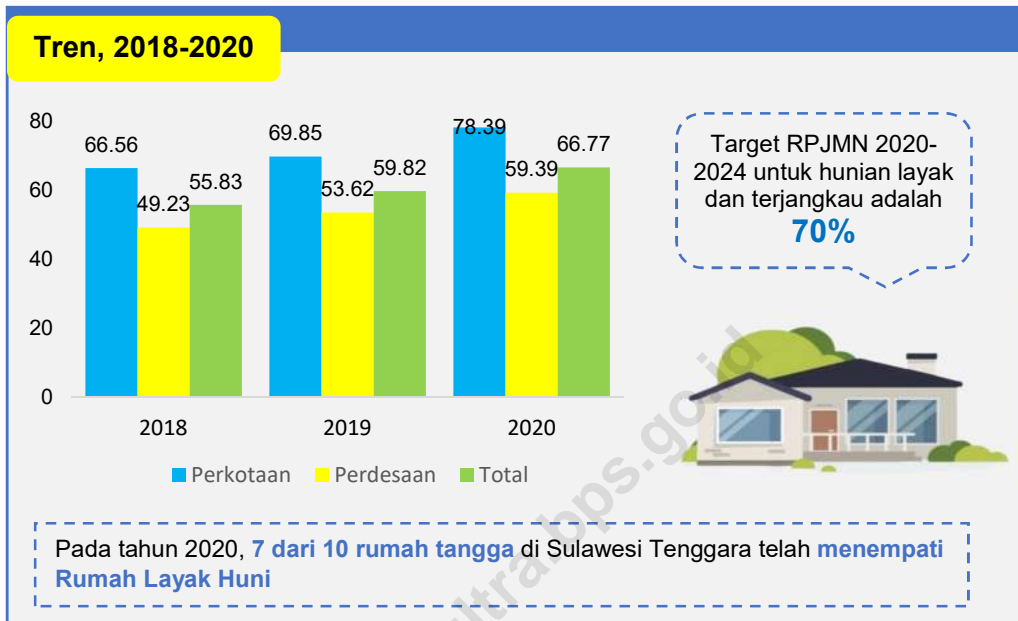
Capaian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal sanitasi layak juga telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Berdasarkan data hasil Susenas Maret 2020, Kota Baubau merupakan wilayah dengan persentase tertinggi untuk rumah tangga yang memiliki sanitasi layak yaitu sebesar 95,60 persen, yang diikuti Kota Kendari dengan persentase sebesar 94,28 persen. Sementara itu, wilayah dengan persentase terendah untuk rumah tangga yang memiliki sanitasi layak adalah Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Konawe Kepulauan, masing-masing sebesar 68,35 persen dan 70,30 persen.

4.3 Rumah Layak Huni

Menempati rumah yang layak huni merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang. Namun, harga rumah yang semakin mahal menyebabkan tidak semua orang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Jaminan pemenuhan akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau juga menjadi agenda prioritas dalam TPB (Tujuan 11.1).

Rumah tangga dianggap menempati rumah layak huni jika memenuhi kriteria dari indikator hunian layak sebagai berikut: (1) ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangan atap terluas berupa genteng, beton, kayu/sirap, dan seng, bahan bangunan dinding terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, anyaman bambu dan batang kayu serta lantai terluas berupa keramik, marmer/granit, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan dan semen/bata merah; (2) kecukupan luas bangunan (*sufficient living space*) minimal 7,2 m² per kapita; (3) akses air minum layak; dan (4) akses sanitasi layak. Data mengenai persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dapat diperoleh dari data Susenas Maret.

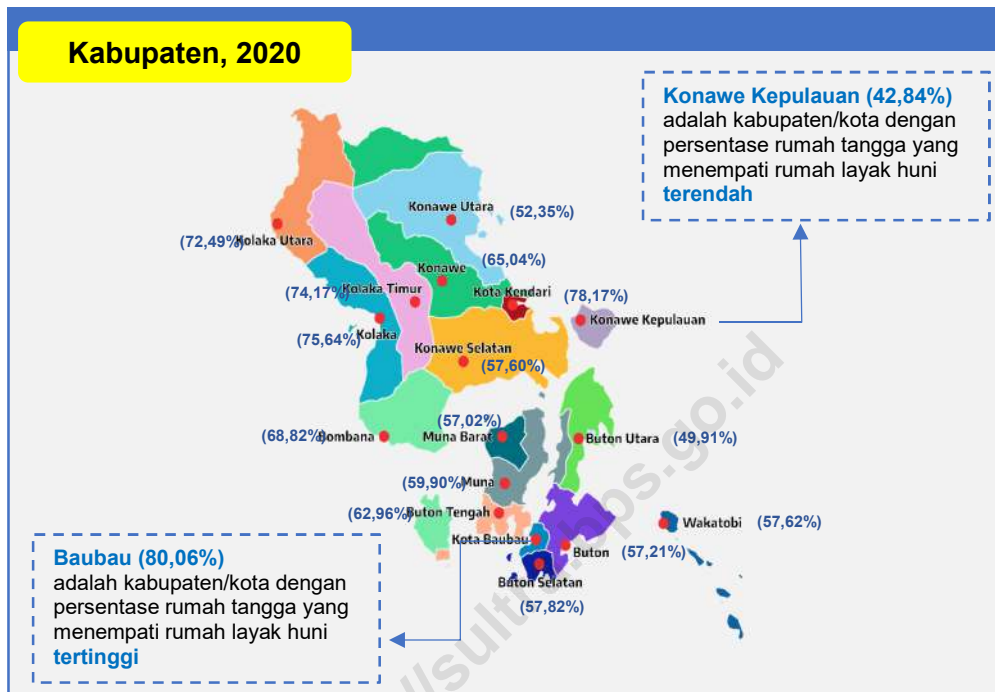
Gambar 4.5
 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni
 Menurut Tipe Daerah, 2018-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang telah menempati rumah layak huni di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari 55,83 persen di tahun 2018 menjadi 66,77 persen di tahun 2020. Pada tahun 2020 persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni untuk daerah perkotaan telah memenuhi target RPJMN 2020-2024 namun untuk rumah tangga yang tinggal di daerah perdesaan masih jauh dari terget yang ingin dicapai oleh RPJMN 2020-2024 yaitu 70 persen rumah tangga seharusnya dapat menempati rumah layak huni. Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni lebih tinggi pada daerah perkotaan jika dibandingkan dengan di perdesaan (78,39 persen berbanding 59,39 persen).

Gambar 4.6
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni
Menurut Kabupaten/Kota, 2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

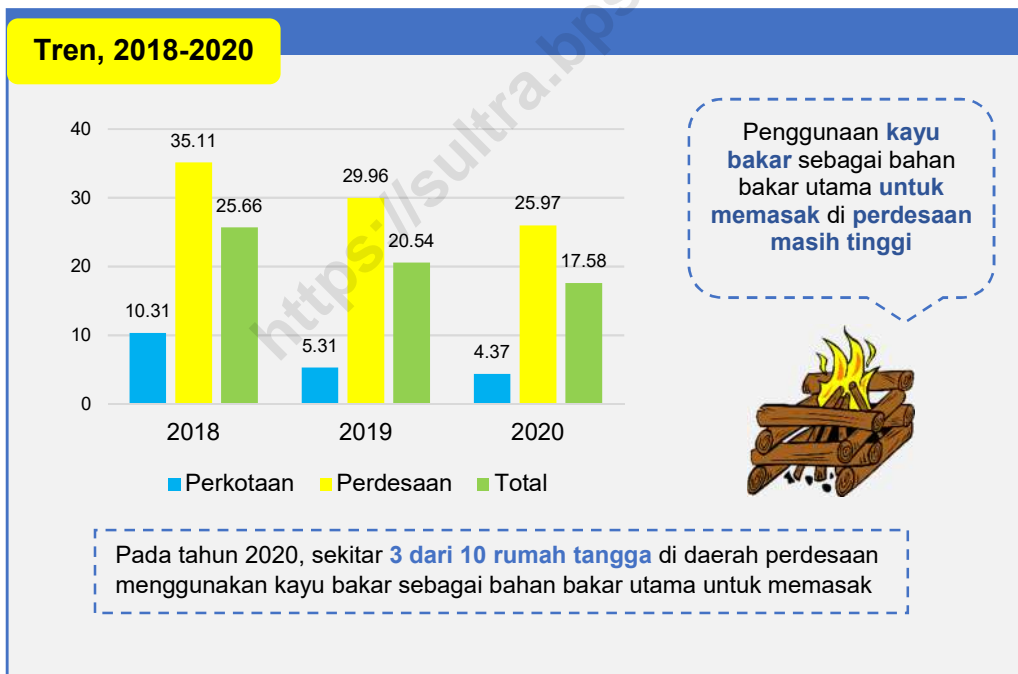
Berdasarkan data hasil Susenas Maret 2020, Kota Baubau merupakan wilayah dengan persentase tertinggi untuk rumah tangga yang memiliki rumah layak huni yaitu sebesar 80,06 persen, yang diikuti Kota Kendari dengan persentase sebesar 78,17 persen. Sementara itu, wilayah dengan persentase terendah untuk rumah tangga yang memiliki rumah layak huni adalah Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Buton Utara, masing-masing sebesar 42,84 persen dan 49,91 persen.

4.4 Penggunaan Kayu Bakar untuk Memasak

Aspek udara merupakan salah satu poin penting dalam kesehatan lingkungan, selain air dan tanah. Oksigen (O₂) yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia untuk bernafas juga berasal dari udara. Untuk itu, kualitas udara harus tetap terjaga dari pencemaran zat-zat berbahaya.

Pencemaran udara dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang dapat menyebabkan pencemaran udara antara lain seperti aktivitas gunung berapi dan kebakaran hutan. Faktor manusia yang dapat menyebabkan pencemaran udara antara lain aktivitas pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Salah satu aktivitas rumah tangga yang menjadi sumber utama pencemaran udara adalah penggunaan kayu bakar untuk memasak. Masih tingginya penggunaan kayu bakar untuk memasak di Indonesia pun menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.

Gambar 4.7
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar sebagai Bahan Bakar Utama untuk Memasak Menurut Tipe Daerah, 2018-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Gambar 4.7 menunjukkan jika persentase penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar utama untuk memasak jauh lebih tinggi di daerah perdesaan (25,97 persen) jika dibandingkan dengan di perkotaan (4,37

persen). Hal ini dikarenakan rumah tangga yang tinggal di perdesaan lebih mudah untuk mendapatkan kayu bakar dibandingkan rumah tangga yang tinggal di perkotaan. Selain itu harga kayu bakar di perdesaan yang lebih murah juga merupakan salah satu alasan tingginya penggunaan bahan bakar kayu di perdesaan walaupun sebagian besar rumah tangga juga memiliki gas elpiji. Walaupun menunjukkan persentase yang cukup tinggi, tren data penggunaan kayu bakar sejak tahun 2018-2020 menunjukkan persentase penggunaan kayu bakar untuk memasak yang menurun, baik di perkotaan dan di perdesaan. Penurunan penggunaan kayu bakar ini sejalan dengan gencarnya upaya pemerintah dalam peningkatan penggunaan sumber energi untuk memasak yang lebih aman dan ramah lingkungan seperti gas elpiji sejak tahun 2007.

Tabel 4.1
 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Kondisi Kesehatan Lingkungan, 2018-2020

Kondisi Kesehatan Lingkungan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tahun 2018			
Air Minum Layak	96,05	83,80	88,47
Sanitasi Layak	81,39	68,81	73,61
Rumah Layak Huni	66,56	49,23	55,83
Tahun 2019			
Air Minum Layak	96,41	85,49	89,66
Sanitasi Layak	88,72	74,21	79,75
Rumah Layak Huni	69,85	53,62	59,82
Tahun 2020			
Air Minum Layak	96,89	89,70	92,49
Sanitasi Layak	92,45	75,98	82,38
Rumah Layak Huni	78,39	59,39	66,77

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Tabel 4.2
 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan
 Kondisi Kesehatan Lingkungan, 2020

Kabupaten/Kota	Kondisi Kesehatan Lingkungan		
	Air minum layak	Sanitasi layak	Rumah layak huni
(1)	(2)	(3)	(4)
Buton	91,60	79,72	57,21
Muna	95,41	71,22	59,90
Konawe	90,27	76,41	65,04
Kolaka	89,84	87,43	75,64
Konawe Selatan	84,24	73,80	57,60
Bombana	95,04	82,75	68,82
Wakatobi	94,29	81,49	57,62
Kolaka Utara	91,49	84,76	72,49
Buton Utara	87,73	79,45	49,91
Konawe Utara	75,76	76,97	52,35
Kolaka Timur	92,32	88,62	74,17
Konawe Kepulauan	98,11	70,30	42,84
Muna Barat	96,41	68,35	57,02
Buton Tengah	95,20	77,16	62,96
Buton Selatan	98,58	81,46	57,82
Kendari	96,69	94,28	78,17
Baubau	99,10	95,60	80,06
Sulawesi Tenggara	92,49	82,38	66,77

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2020



BAB V

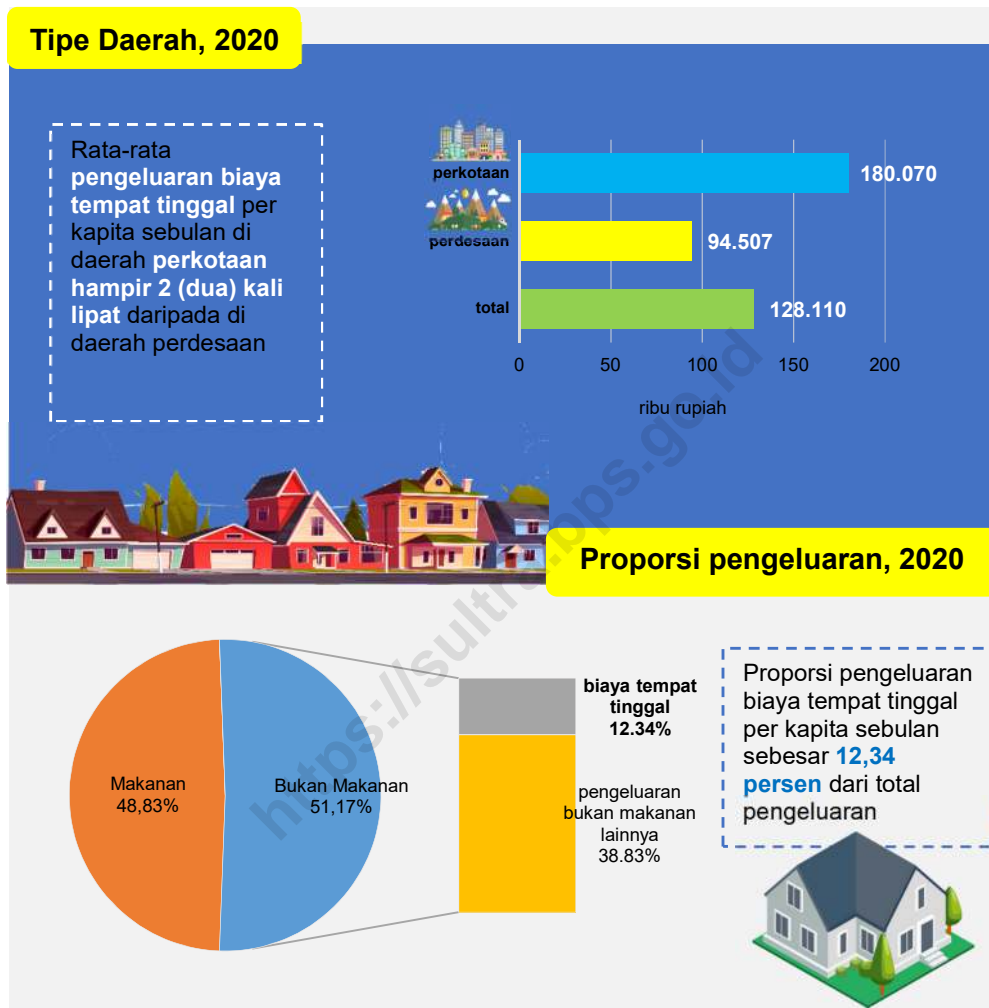
PENGELUARAN PERUMAHAN

Pemenuhan kebutuhan hidup akan menimbulkan pengeluaran dalam rumah tangga, salah satunya adalah pengeluaran untuk kebutuhan perumahan. Pengeluaran perumahan merupakan bagian dari pengeluaran bukan makanan yang memiliki porsi yang cukup besar. Data Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar Rp 271.416,00 per kapita sebulan atau 51,11 persen dari total pengeluaran bukan makanan. Dengan kata lain, lebih dari separuh pengeluaran bukan makanan adalah pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Sedangkan pengeluaran perumahan terhadap total pengeluaran rumah tangga adalah sebesar 26,15 persen, yang berarti lebih dari seperempat pengeluaran rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga. Ulasan terkait pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga akan disajikan lebih rinci pada bab ini yaitu meliputi pengeluaran untuk tempat tinggal, listrik, air, serta bahan bakar untuk memasak.

5.1 Pengeluaran untuk Tempat Tinggal

Pengeluaran untuk rumah atau tempat tinggal menjadi bagian yang penting, karena rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, selain makanan dan pakaian. Pengeluaran untuk rumah milik sendiri dan rumah tangga yang menempati rumah dinas didekati dengan perkiraan biaya rumah milik sendiri yang diperkirakan oleh responden berdasarkan harga sewa rumah di daerah tempat tinggalnya. Sedangkan, pengeluaran untuk rumah bukan milik sendiri dilihat dari biaya kontrak/sewa rumah.

Gambar 5.1.
Rata-rata Pengeluaran untuk Biaya Tempat Tinggal
Perkapita Sebulan menurut Tipe Daerah, 2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret, 2020

Dari Gambar 5.1 dapat dilihat bahwa rata-rata pengeluaran biaya tempat tinggal yaitu perkiraan sewa rumah sendiri atau kontrak/sewa rumah per kapita sebulan untuk daerah perkotaan sebesar Rp 180.070,00 jauh lebih besar dibanding dengan perdesaan yaitu sebesar Rp 94.507,00. Pengeluaran untuk biaya tempat tinggal di daerah perkotaan mencapai hampir dua kali lipat pengeluaran di daerah perdesaan. Perbedaan pengeluaran yang cukup tinggi ini

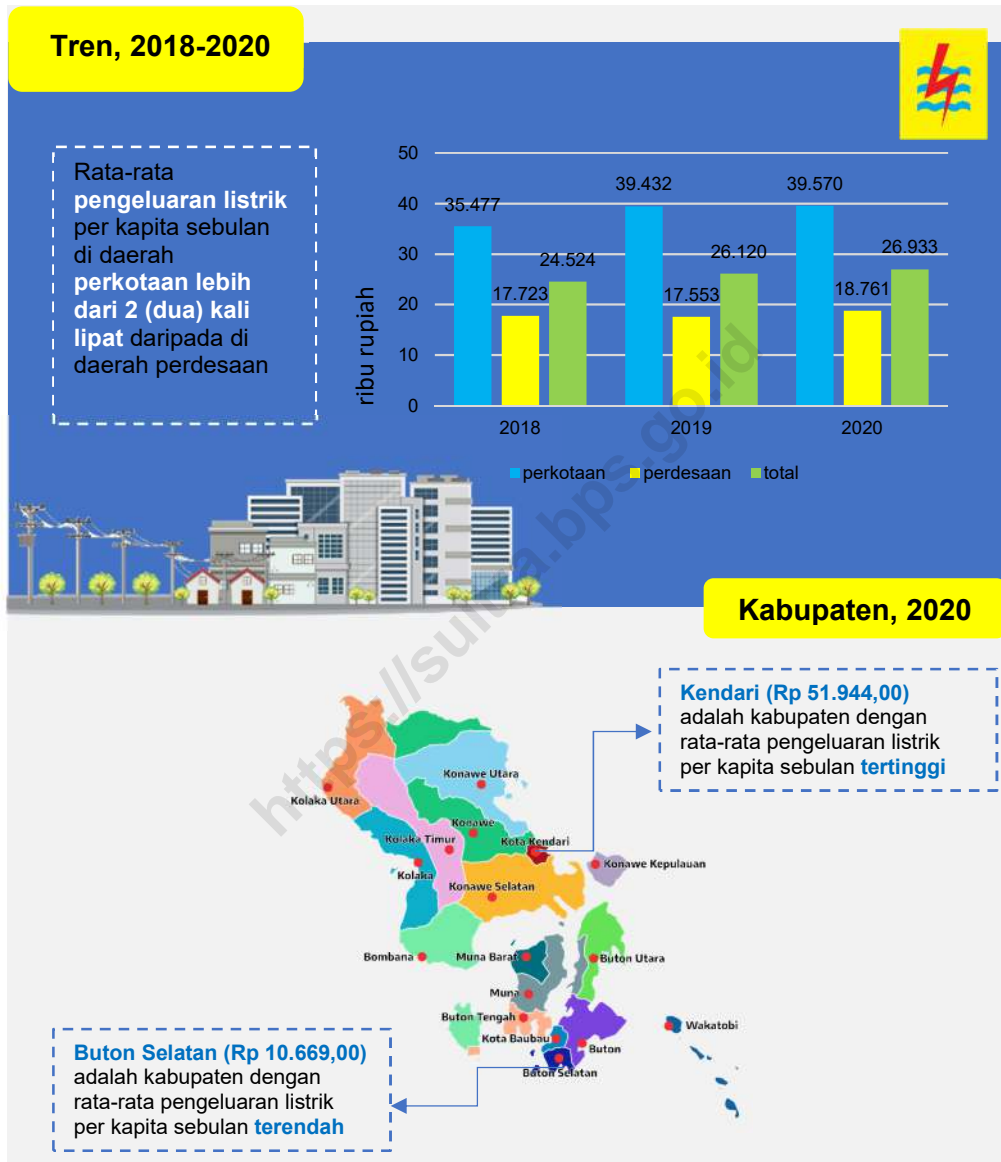
menunjukkan bahwa untuk tinggal di perkotaan memerlukan biaya yang cukup besar dibandingkan dengan di perdesaan.

Pada tahun 2020, pengeluaran biaya tempat tinggal per kapita sebulan adalah sebesar Rp. 128.110,00. Total pengeluaran rumah tangga yang dikeluarkan untuk biaya konsumsi makanan dan bukan makanan per kapitanya sebulan adalah sebesar Rp 1.037.799,00. Jika melihat hal tersebut maka dapat dikatakan proporsi pengeluaran biaya tempat tinggal terhadap total pengeluaran rumah tangga cukup besar. Besarnya pengeluaran biaya tempat tinggal per kapita sebulan terhadap total pengeluaran mencapai 12,34 persen dari total pengeluaran.

5.2 Pengeluaran Listrik

Listrik saat ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan bisa dikatakan listrik merupakan kebutuhan dasar manusia, selain pangan, sandang dan papan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan manusia akan listrik menjadi salah satu tujuan dalam TPB (Target 7.1) yaitu pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. Semakin besar konsumsi listrik per kapita menggambarkan pemenuhan kebutuhan listrik yang semakin baik. Konsumsi listrik per kapita dapat didekati dengan pengeluaran per kapita sebulan, yang artinya semakin tinggi pengeluaran listrik per kapita dapat menggambarkan pemenuhan kebutuhan listrik yang semakin baik. Pada tahun 2020 pengeluaran listrik per kapita sebulan adalah sebesar Rp. 26.933,00. Jika dibandingkan dengan total pengeluaran yang dikeluarkan per kapita sebulan maka proporsi pengeluaran listrik terhadap total pengeluaran adalah sebesar 2,60 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Porsi listrik dalam pengeluaran rumah tangga tidak terlalu besar. Meskipun demikian, listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital yang keberadaannya sangat diperlukan oleh manusia dengan kadar kebutuhan yang berbeda-beda.

Gambar 5.2.
Rata-rata Pengeluaran Listrik Perkapita Sebulan Menurut Tipe Daerah dan Kabupaten/Kota, 2018-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Gambar 5.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran listrik per kapita sebulan sebesar Rp 26.933,00. Rata-rata pengeluaran listrik selalu mengalami kenaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari Rp. 24.524,00 di tahun 2018 menjadi Rp. 26.933,00 di tahun

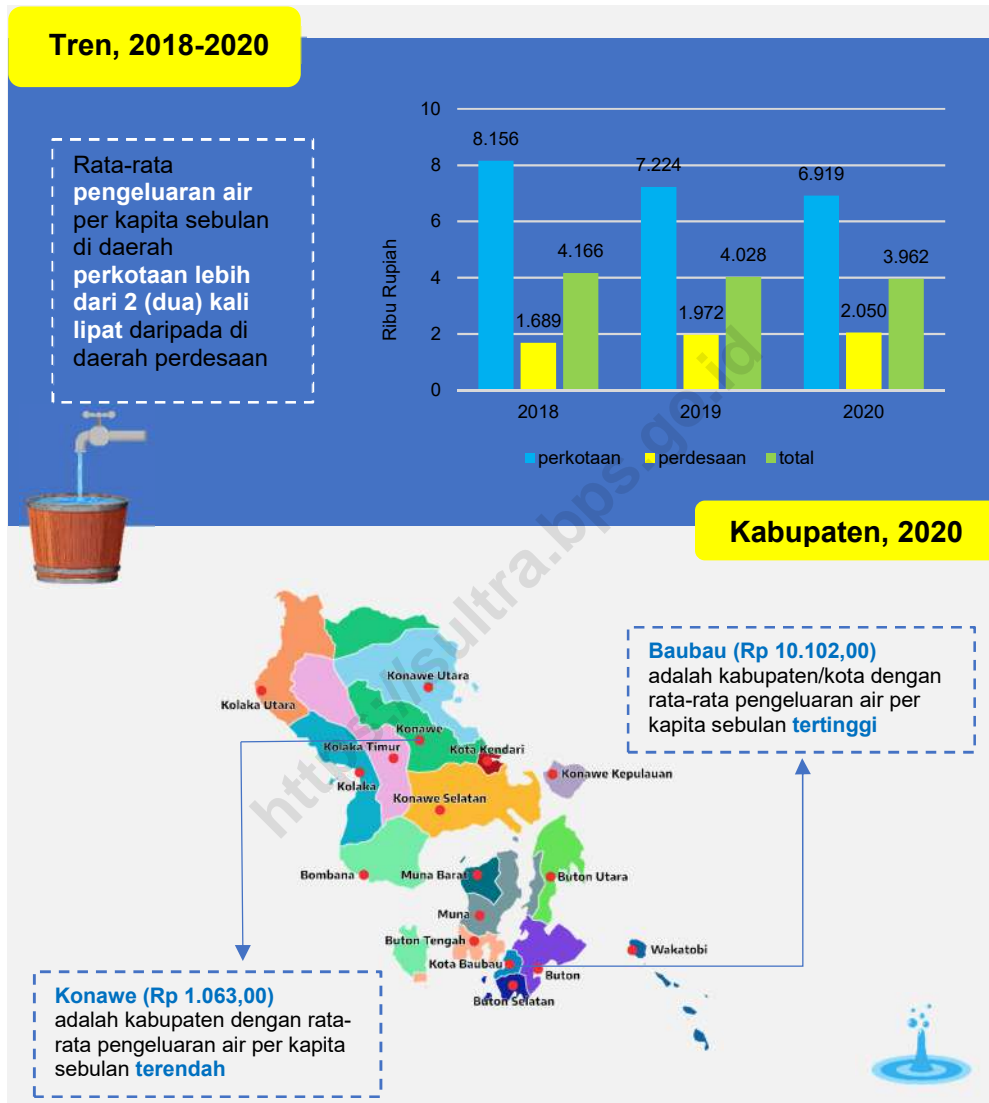
2020. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran listrik per kapita sebulan di perkotaan yaitu sebesar Rp 39.570,00 lebih besar daripada pengeluaran listrik di daerah perdesaan yaitu sebesar Rp 18.761,00. Dengan kata lain, rata-rata pengeluaran listrik per kapita sebulan di daerah perkotaan lebih dari 2 (dua) kali lipat daripada di daerah perdesaan. Penduduk di daerah perkotaan juga jauh lebih banyak menggunakan listrik dibandingkan dengan penduduk perdesaan (Tabel 3.5).

Perbedaan penggunaan listrik antar kabupaten dalam penggunaan listrik dan biaya pengeluaran untuk listrik dapat dilihat pada Tabel 5.2. Kabupaten dengan rata-rata pengeluaran listrik per kapita sebulan tertinggi adalah Kota Kendari yaitu sebesar Rp 51.944,00. Sedangkan kabupaten dengan rata-rata pengeluaran listrik per kapita sebulan terendah adalah Kabupaten Buton Selatan yaitu sebesar Rp 10.669,00. Terdapat rentang yang cukup besar rata-rata pengeluaran listrik per kapita antara kabupaten tertinggi dan terendah. Hal ini menunjukkan tingginya konsumsi listrik di Kota Kendari, sebaliknya konsumsi listrik di Kabupaten Buton Selatan masih rendah.

5.3 Pengeluaran Air

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, baik untuk minum maupun untuk kebutuhan lainnya seperti mandi, cuci, dan lainnya. Kebutuhan manusia atas air untuk minum, mandi, cuci dan lainnya ini menimbulkan adanya pengeluaran rumah tangga untuk air. Pencatatan untuk pengeluaran air ialah biaya yang riil dikeluarkan oleh suatu rumah tangga untuk membeli air. Rumah tangga yang tidak membeli air misalnya rumah tangga yang menggunakan air yang berasal dari sumur sendiri maka biayanya tidak diperkirakan. Pencatatan pengeluaran untuk komoditas air meliputi biaya yang dikeluarkan untuk membayar air PAM, air pikulan atau membeli air namun tidak termasuk pengeluaran untuk air kemasan atau air isi ulang untuk minum. Pengeluaran untuk air kemasan atau air isi ulang untuk minum tetap dicatat namun pada rincian pengeluaran bahan minuman bukan pada pengeluaran air.

Gambar 5.3.
Rata-rata Pengeluaran Air Perkapita Sebulan Menurut Tipe Daerah dan Kabupaten/Kota, 2018-2020



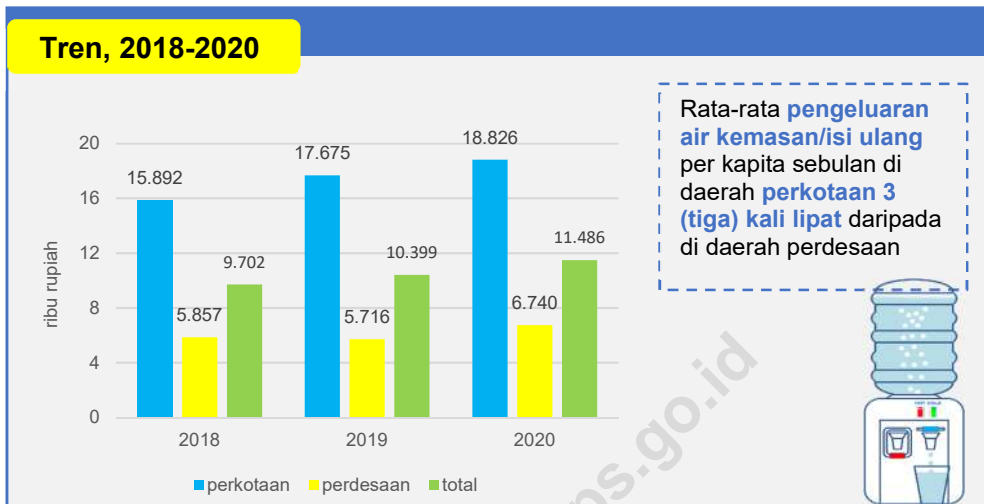
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk air sebesar Rp 3.962,00 atau 0,38 persen dari total pengeluaran (Gambar 5.3). Meskipun air merupakan kebutuhan dasar manusia, proporsi pengeluaran air terhadap total pengeluaran sangat kecil. Rata-rata pengeluaran air per kapita sebulan di daerah perkotaan (Rp 6.919,00) jauh lebih besar daripada di perdesaan (Rp 2.050,00). Di daerah

perkotaan, kebutuhan air dan konsumsi air untuk minum maupun mandi/cuci lebih banyak berasal dari sumber air membeli, seperti PAM, membeli air, dan lainnya. Sementara masyarakat di perdesaan masih banyak mengonsumsi air yang diperoleh dari sumber air lainnya yang tidak membeli, misalnya sumur atau mata air. Data 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan bahwa terjadi penurunan pengeluaran per kapita sebulan untuk air dari tahun 2018 ke tahun 2020. Penurunan pengeluaran air ini sejalan dengan peningkatan proporsi rumah tangga yang mengonsumsi air isi ulang dan peningkatan rumah tangga yang menggunakan sumur bor/pompa. Rumah tangga yang menggunakan air isi ulang pada tahun 2018 adalah sebesar 31,41 persen meningkat menjadi 37,02 persen pada tahun 2020. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan air yang bersumber dari sumur bor/pompa untuk keperluan sehari-hari pada tahun 2018 adalah sebesar 23,57 persen meningkat menjadi 31,23 persen pada tahun 2020. Rumah tangga yang menggunakan air isi ulang maka pengeluarannya dicatat di pengeluaran bahan minuman sedangkan rumah tangga yang menggunakan sumur bor/pompa milik sendiri maka tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk membeli air.

Jika kita melihat rata-rata pengeluaran air per kapita sebulan menurut kabupaten/kota, kabupaten dengan pengeluaran per kapita sebulan untuk air paling tinggi adalah Kota Baubau yaitu sebesar Rp 10.102,00. Adapun kabupaten dengan pengeluaran per kapita sebulan untuk air paling rendah adalah Kabupaten Konawe yaitu sebesar Rp 1.063,00. Rentang nilai yang cukup jauh antar kabupaten di Indonesia merupakan gambaran dari pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air yang sangat bervariasi menurut sumber air tersebut berasal. Kota Baubau memiliki pengeluaran air yang tinggi dikarenakan mayoritas rumah tangga menggunakan air yang bersumber dari air PAM untuk keperluan sehari-harinya (memasak, mandi, cuci, dll) sedangkan Kabupaten Konawe mayoritas rumah tangganya menggunakan air yang bersumber dari sumur bor/pompa untuk keperluan sehari-harinya.

Gambar 5.4.
Rata-rata Pengeluaran Air Kemasan/Isi Ulang
Perkapita Sebulan Menurut Tipe Daerah, 2018-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

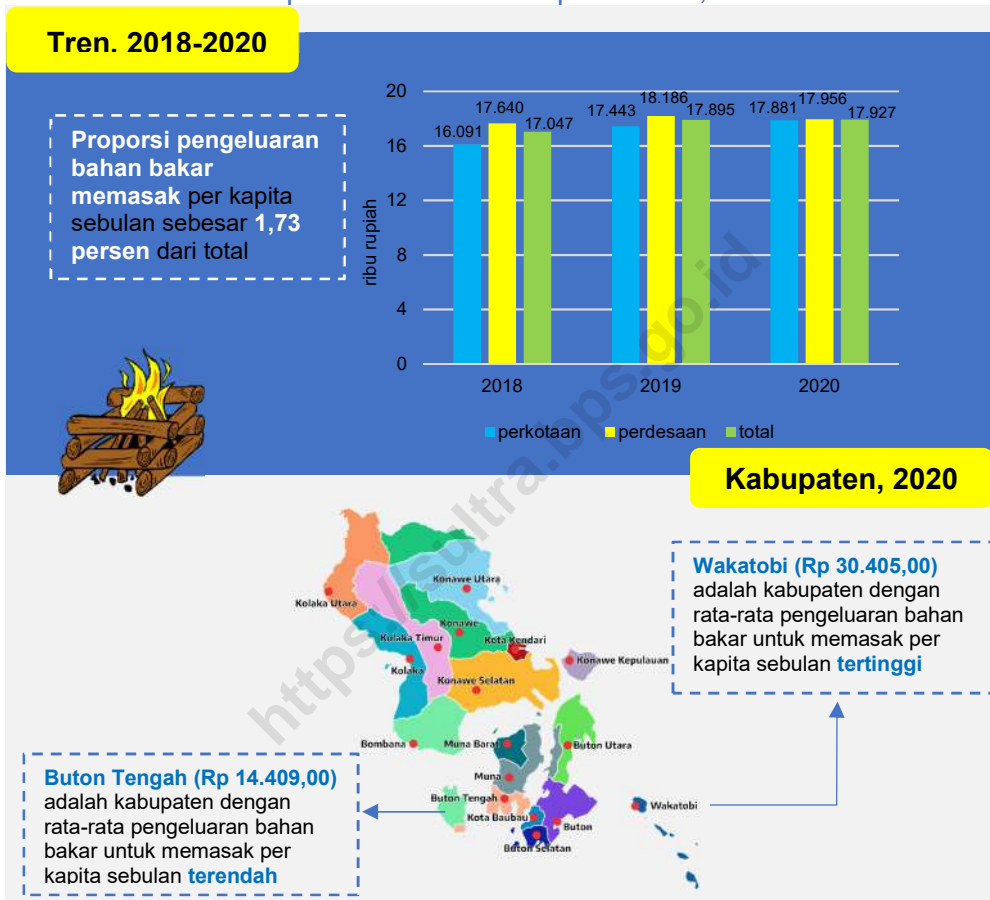
Saat ini, penggunaan air kemasan atau air isi ulang khususnya untuk minum meningkat. Rata-rata pengeluaran air kemasan selalu mengalami kenaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari Rp. 9.702,00 di tahun 2018 menjadi Rp. 11.486,00 di tahun 2020. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk air kemasan sebesar Rp 11.486,00 atau 1,11 persen dari total pengeluaran. Jika dibandingkan dengan pengeluaran air, rata-rata pengeluaran air kemasan per kapita sebulan jauh lebih tinggi. Hal ini dapat menunjukkan penggunaan air kemasan yang cukup tinggi daripada sumber air lain yang sudah disebutkan sebelumnya. Penggunaan air kemasan di perkotaan lebih besar daripada di perdesaan dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk air kemasan di perkotaan yaitu sebesar Rp 18.826,00, angka ini tiga kali lipat lebih besar dibandingkan pengeluaran air di perdesaan yaitu sebesar Rp 6.740,00.

5.4 Pengeluaran Bahan Bakar untuk Memasak

Memasak merupakan aktivitas yang biasa dilakukan dalam suatu rumah tangga. Aktivitas memasak memerlukan bahan bakar sebagai sumber energi. Bahan bakar untuk memasak bisa menggunakan gas, minyak tanah, arang/kayu

bakar, dan lainnya. Pengeluaran untuk bahan bakar memasak merupakan bagian dari pengeluaran rumah tangga.

Gambar 5.5.
Rata-rata Pengeluaran Bahan Bakar untuk Memasak Perkapita Sebulan Menurut Tipe Daerah dan Kabupaten/Kota, 2018-2020



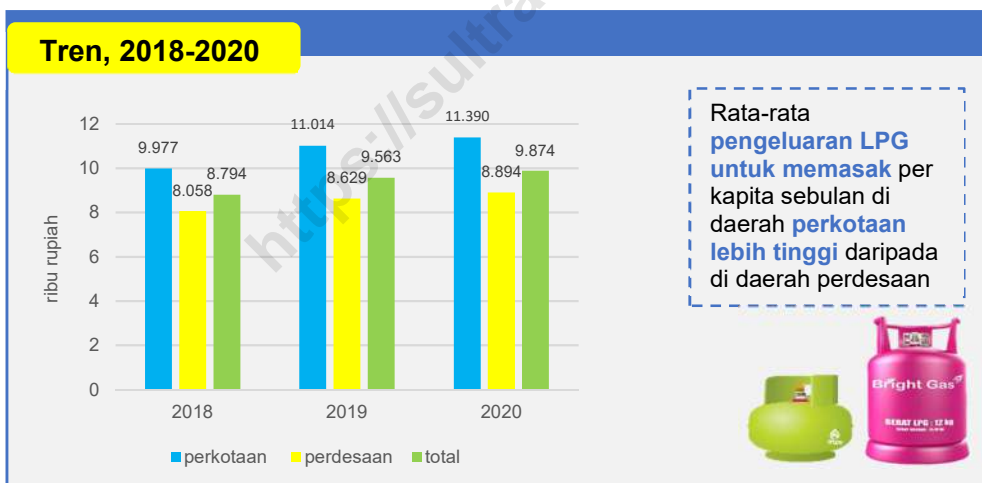
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran bahan bakar memasak per kapita sebulan sebesar Rp 17.927,00. Rata-rata pengeluaran bahan bakar memasak per kapita sebulan di daerah perkotaan yaitu sebesar Rp 17.881,00 sedikit lebih rendah dibandingkan daerah perdesaan yaitu sebesar Rp17.956,00. Gambar 5.5 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2020, tidak terjadi perubahan yang cukup berarti untuk rata-rata pengeluaran bahan

bakar memasak per kapita sebulan yaitu dari Rp. 17.047,00 di tahun 2018 menjadi Rp. 17.927,00 di tahun 2020.

Pengeluaran untuk bahan bakar memasak berbeda-beda di setiap kabupaten/kota. Kabupaten dengan rata-rata pengeluaran bahan bakar memasak per kapita sebulan tertinggi adalah Kabupaten Wakatobi sebesar Rp 30.405,00, sedangkan kabupaten dengan rata-rata pengeluaran bahan bakar memasak per kapita sebulan terendah adalah Kabupaten Buton Tengah yaitu sebesar Rp 14.409,00. Pengeluaran untuk bahan bakar memasak di Kabupaten Wakatobi terbilang cukup tinggi, hal ini dikarenakan tingginya harga bahan bakar untuk memasak di Kabupaten Wakatobi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Gambar 5.6.
Rata-rata Pengeluaran LPG untuk Memasak
Perkapita Sebulan, 2018-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Karena ketersediaan dan keberadaan bahan bakar lainnya seperti minyak tanah sudah menipis dan semakin sulit untuk didapatkan, maka bahan bakar untuk memasak yang dianjurkan adalah menggunakan gas. Gas dianggap sebagai salah satu sumber energi yang terjangkau, andal, dan modern, serta merupakan bahan bakar yang bersih dan berteknologi. Penggunaan gas sesuai dengan TPB Tujuan 7.1 yaitu pada tahun 2023, menjamin akses universal

layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern. Pada tahun 2020 rata-rata penggunaan gas (LPG) untuk memasak per kapita sebulan sebesar Rp 9.874,00 atau sebesar 0,95 dari total pengeluaran. Rata-rata pengeluaran gas untuk memasak per kapita sebulan di daerah perkotaan (Rp 11.390,00) lebih tinggi daripada di daerah perdesaan (Rp 8.894,00). Gambar 5.6 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, rata-rata pengeluaran untuk gas mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 8.794,00 di tahun 2018 menjadi Rp. 9.874,00 di tahun 2020.

<https://sultra.bps.go.id>

Tabel 5.1
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)
Menurut Jenis Barang Bukan Makanan, 2018-2020

Jenis Barang	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Biaya Tempat Tinggal (perkiraan sewa rumah sendiri, dinas, kontrak atau sewa)			
2018	184.775	94.578	129.133
2019	196.237	98.012	136.474
2020	180.070	94.507	128.110
Listrik (Listrik PLN dan non-PLN)			
2018	35.477	17.723	24.524
2019	39.432	17.553	26.120
2020	39.570	18.761	26.933
Air			
2018	8.156	1.689	4.166
2019	7.224	1.972	4.028
2020	6.919	2.050	3.962
LPG			
2018	9.977	8.058	8.794
2019	11.014	8.629	9.563
2020	11.390	8.894	9.874

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Lanjutan Tabel 5.1

Jenis Barang	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Bahan Bakar untuk Memasak (LPG, minyak tanah, arang, kayu bakar, dll)			
2018	16.091	17.640	17.047
2019	17.443	18.186	17.895
2020	17.881	17.956	17.927
Total Pengeluaran untuk Perumahan (Biaya Tempat Tinggal, Listrik, Air, Bahan Bakar Kendaraan, Bahan Bakar Memasak, Telekomunikasi, dll)			
2018	357.200	197594	258739
2019	389.731	207426	278812
2020	369.058	208268	271416
Total Pengeluaran Barang Bukan Makanan (Perumahan, Aneka Barang Jasa, Pakaian, Barang Tahan Lama, Pajak, dll)			
2018	721.816	382.113	512.253
2019	754.733	411.784	546.075
2020	744.283	393.163	531.060
Total Pengeluaran Rumah Tangga (Barang Makanan dan Bukan Makanan)			
2018	1.255.958	792.012	969.749
2019	1.305.906	838.114	1.021.290
2020	1.316.402	857.621	1.037.799

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Tabel 5.2
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)
Menurut Jenis Barang Bukan Makanan dan Kabupaten/Kota, 2020

Kabupaten/Kota	Biaya Tempat Tinggal	Pengeluaran		
		Listrik	Air	Bahan Bakar untuk Memasak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buton	59.933	16.781	3.098	18.870
Muna	64.457	18.967	4.792	18.385
Konawe	122.129	27.028	1.063	15.844
Kolaka	117.608	29.584	2.559	16.856
Konawe Selatan	118.630	22.320	1.243	17.488
Bombana	95.184	23.472	3.042	16.992
Wakatobi	79.061	22.320	4.343	30.405
Kolaka Utara	110.796	21.836	4.388	16.277
Buton Utara	104.892	16.781	1.745	22.182
Konawe Utara	131.703	22.296	1.376	16.206
Kolaka Timur	169.269	25.956	4.885	18.131
Konawe Kepulauan	105.816	13.879	1.922	17.878
Muna Barat	52.299	14.666	1.702	16.028
Buton Tengah	45.322	12.535	5.671	14.049
Buton Selatan	77.440	10.669	1.668	26.063
Kendari	245.099	51.944	7.007	16.498
Baubau	167.893	32.041	10.102	18.844

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020

Lanjutan Tabel 5.2

Kabupaten/Kota	Pengeluaran		
	Total Perumahan	Total Bukan Makanan	Total Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
Buton	170.678	404.348	795.159
Muna	172.885	408.258	809.677
Konawe	262.379	477.323	968.539
Kolaka	268.436	544.630	1.135.254
Konawe Selatan	237.155	415.211	901.433
Bombana	224.203	484.786	993.701
Wakatobi	213.345	419.879	896.836
Kolaka Utara	252.741	493.360	1.041.145
Buton Utara	210.741	445.636	892.738
Konawe Utara	262.625	543.716	1.176.540
Kolaka Timur	305.973	483.415	1.007.634
Konawe Kepulauan	193.817	314.108	716.948
Muna Barat	136.068	278.077	651.286
Buton Tengah	125.665	207.852	544.071
Buton Selatan	165.921	287.033	670.319
Kendari	489.336	1.006.009	1.684.698
Baubau	330.919	625.054	1.071.599

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Susenas Maret 2018-2020



Sensus
Penduduk
2020
#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sultra.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jl. Boulevard No. 1 Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp. 0401-3135363; Fax. 0401-3122355;
E-Mail: bps7400@bps.go.id; Website: <http://sultra.bps.go.id>

ISBN 978-602-5407-63-5



9 786025 407635